

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN,
PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN
LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR**

**(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR
CONSUMER GOODS INDUSTRY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2017-2019)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**FAISAL RAFID AKHDANIYANTO
NIM. 175030400111034**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
MALANG
2021**

MOTTO

**Usaha dan Doa Tidak Akan Mengkhianati
Kita. Manusia wajar lelah, tapi jangan sampai
menyerah.**

Semangat dan Sehat Selalu





TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan,
dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan
Manufaktur (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub
Sektor *Consumer Goods Industry* Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)

Disusun oleh : Faisal Rafid Akhdaniyanto

NIM : 175030400111034

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 22 Maret 2021

Dosen Pembimbing Skripsi

Nurlita Sukma Alfandia, SE.,MA
NIP. 198811112019032015

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada :

Hari : J u m a t

Tanggal : 9 April 2020

Jam : 10.00 – 11.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Faisal Rafid Akhdaniyanto

Judul : Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Consumer Goods Industry* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)

Dan dinyatakan

LULUS

Majelis Penguji

Ketua

Nurlita Sukma Aifandia, SE., MA

NIP.19881112019032015

Anggota

Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., Ak

NIP. 198611172015042002

Anggota

Kartika Putri Kumalasari, SE., MSA., Ak

NIP.198711232015042002

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, dalam naskah skripsi yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Consumer Goods Industry* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2019)”, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 22 Maret 2021
Yang membuat pernyataan,



Faisal Rafid Akhdaniyanto
NIM. 175030400111034

RINGKASAN

Faisal Rafid Akhdaniyanto, 2020, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Consumer Goods Industry* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA.

Perusahaan yang melakukan operasionalnya di Indonesia memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk disetorkan kepada negara dalam bentuk pajak. Dilain sisi, secara umum perusahaan sebagai bentuk usaha didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba operasional sebesar-besarnya. *Agency theory* menyebutkan bahwa dalam sebuah perusahaan terdapat hubungan kontraktual antara prinsipal dengan agen. Agen dalam sebuah perusahaan mempunyai tugas untuk memberikan kesejahteraan kepada prinsipal melalui pengembalian modal yang cepat dan sebesar-besarnya dengan cara memaksimalkan laba perusahaan. Oleh karena alasan tersebut, agen memerlukan strategi untuk meminimalkan beban pajak perusahaan salah satunya melalui *Tax Avoidance*. *Tax Avoidance* dalam penerapannya pada suatu perusahaan tidak melanggar peraturan perpajakan karena hanya memanfaatkan *loopholes* dari peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage*. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan *explanatory research*. Populasi dalam penelitian ini adalah 61 perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods industry* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Sampel penelitian yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan adalah sebanyak 31 perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods industry* periode 2017-2019.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* sedangkan *tax avoidance* menjadi variabel terikat pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan perubahan skala perusahaan tidak berkaitan dengan tingkat aktivitas *tax avoidance*. Sementara itu variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan perubahan nilai pertumbuhan penjualan akan berdampak pada tingkat aktivitas *tax avoidance*. Variabel *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan perubahan rasio utang terhadap ekuitas perusahaan berpengaruh terhadap indikasi aktivitas *tax avoidance*. Pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* secara simultan adalah sebesar 17,6%.

Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, *Leverage*, *Tax Avoidance*

SUMMARY

Faisal Rafid Akhdaniyanto, 2020, *The Influence of Firm Size, Sales Growth, and Leverage towards Tax Avoidance (Study on Manufacturing Companies In The Consumer Goods Industry Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange Year 2017-2019)*. Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA

Companies that operate in Indonesia have an obligation to put aside their part of income to be deposited for the state in the form of tax. On the other side, companies as a form of business in general are established with the purpose of maximizing its operating profit. Agency Theory states that there is a contractual relationship between principal and agent in a company. In a company agent has a duty to provide welfare for principals through maximum and fast return on capital by maximizing company profits. For that reason, agents need to have a strategy to minimize tax expenses that must be paid by the company and one of them is through tax avoidance. Tax Avoidance in a company does not violated tax regulations because its only utilizes loopholes in tax regulations that are still being applied.

This study aims to determine the influence of firm size, leverage, and sales growth towards tax avoidance. The type of research used is explanatory research. The population in this study were 61 manufacturing companies in the consumer goods industry sub sector which were listed on the Indonesia Stock Exchange for 2017-2019 period. The research samples that met the predetermined criteria were 31 manufacturing companies in the consumer goods industry sub-sector for 2017-2019 period.

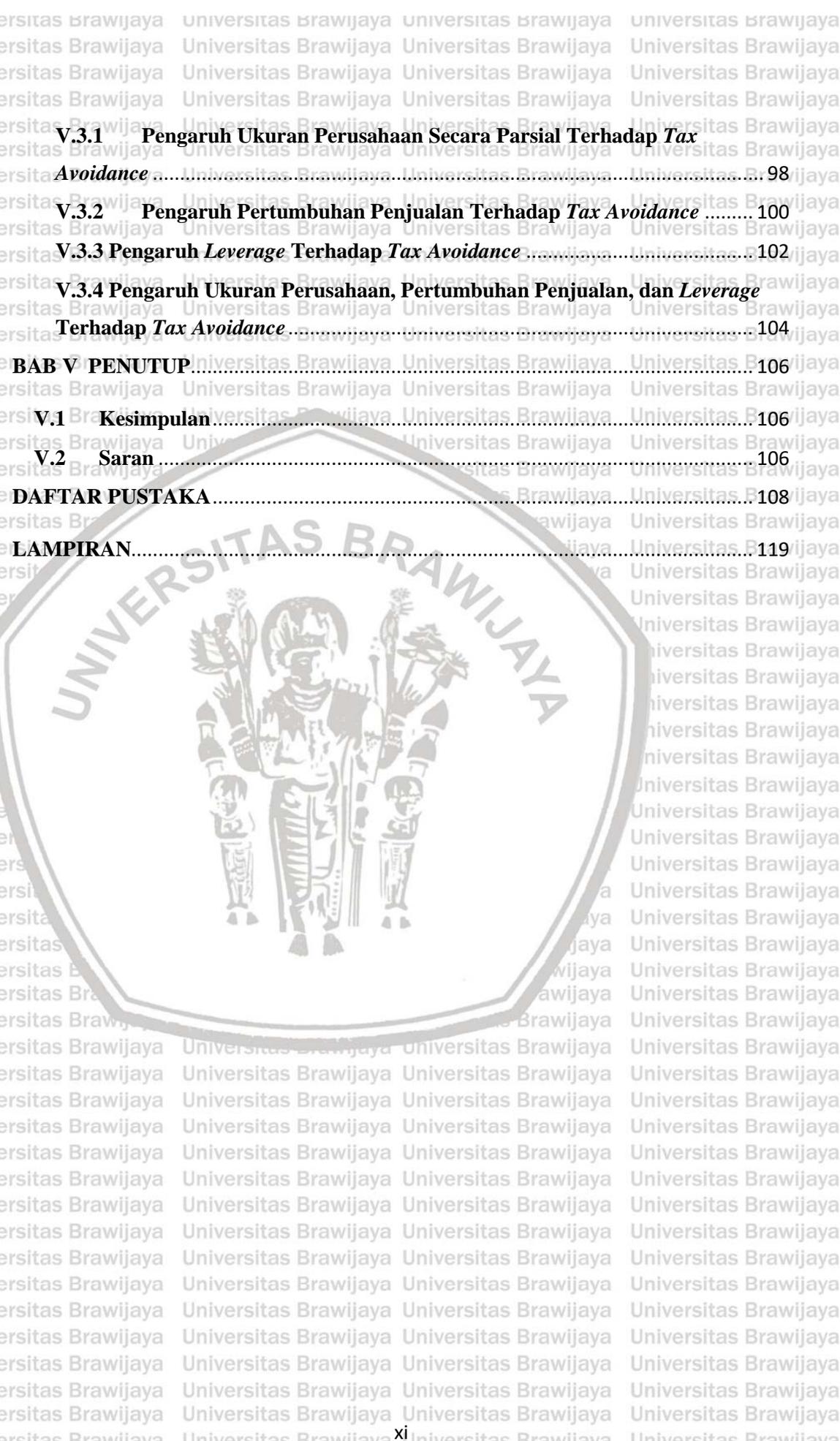
The independent variable in this study is firm size, sales growth, and leverage while tax avoidance is the dependent variable in this study. The result of this study show that firm size has no effect towards tax avoidance which indicates that changes in company scale are not related to the level of tax avoidance activity. Meanwhile, sales has an effect towards tax avoidance, which shows that changes in sales growth will have an impact on the level on tax avoidance activity. Leverage has an effect on tax avoidance, which shows that changes in the debt to equity ratio have an effect on indications of tax avoidance activities. The F-test shows that firm size, sales growth, leverage simultaneously affect tax avoidance. The simultaneous effect of firm size, sales growth, and leverage towards tax avoidance is 17.6%.

Keyword : Firm Size, Sales Growth, Leverage, Tax Avoidance

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	9
I.3 Tujuan Penelitian	9
I.4 Kontribusi Penelitian	10
I.4.1 Kontribusi Teoritis	10
I.4.2 Kontribusi Kebijakan	10
I.4.3 Kontribusi Praktis	10
I.5 Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
II.1 TINJAUAN EMPIRIS	13
II.2 TINJAUAN TEORITIS	20
II.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)	20
II.2.2 Teori Trade Off	23
II.2.2 Pajak	24

II.2.3	Perencanaan Pajak	26
II.2.4	<i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak)	28
II.2.5	Ukuran Perusahaan	32
II.2.6	Pertumbuhan Penjualan	35
II.2.7	Leverage	37
II.3	Hubungan Antar Variabel	42
II.3.1	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	42
II.3.2	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	44
II.3.3	Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	46
II.4	Model Konseptual	47
II.5	Model Hipotesis	48
BAB III	METODE PENELITIAN	50
III.1	Jenis Penelitian	50
III.2	Jenis Data dan Sumber Data	51
III.3	Lokasi Penelitian	51
III.4	Variabel dan Pengukuran	52
III.4.1	Variabel Penelitian	52
III.4.2	Definisi Operasional Variabel	53
III.5	Populasi dan Sampel	55
III.5.1	Populasi	55
III.5.2	Sampel	56
III.6	Metode Pengumpulan Data	59
III.7	Teknik Analisis Data	59
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
IV.1	Gambaran Umum Perusahaan Sampel	66
IV.2	Analisis dan Interpretasi Data	78
IV.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	78
IV.2.2	Uji Asumsi Klasik	88
IV.2.3	Analisis Regresi Linear Berganda	92
IV.2.4	Uji Hipotesis	94
IV.3	Pembahasan	98



V.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Secara Parsial Terhadap Tax Avoidance 98

V.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance 100

V.3.3 Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance 102

V.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance 104

BAB V PENUTUP..... 106

V.1 Kesimpulan..... 106

V.2 Saran..... 106

DAFTAR PUSTAKA..... 108

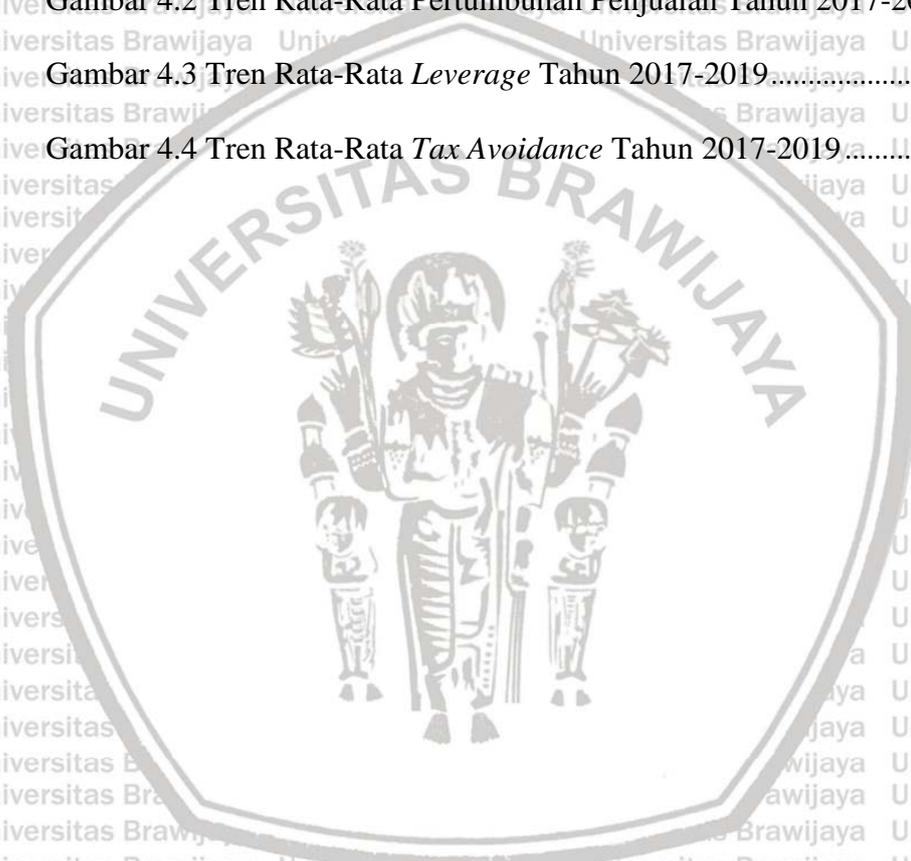
LAMPIRAN..... 119

DAFTAR TABEL

Tabel.2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2.2 Kriteria Ukuran Perusahaan	33
Tabel 2.3 Rasio <i>Leverage</i>	41
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel.....	55
Tabel 3.2 Prosedur Pemilihan Sampel.....	57
Tabel 3.3 Daftar Perusahaan Sampel.....	58
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan.....	79
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penjualan.....	81
Tabel 4.3 Analisis Statistik Deskriptif <i>Leverage</i>	84
Tabel 4.4 Analisis Statistik Deskriptif <i>Tax Avoidance</i>	86
Tabel 4.5 Uji Normalitas	88
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas	89
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi.....	90
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas.....	91
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	92
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik T (Uji Parsial)	95
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik F (Simultan)	97
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proyeksi Penerimaan Pajak Berdasarkan RAPBN.....	2
Gambar 2.1 Model Konsep.....	48
Gambar 2.2 Model Hipotesis.....	49
Gambar 4.1 Tren Rata-Rata Ukuran Perusahaan Tahun 2017-2019.....	80
Gambar 4.2 Tren Rata-Rata Pertumbuhan Penjualan Tahun 2017-2019.....	82
Gambar 4.3 Tren Rata-Rata <i>Leverage</i> Tahun 2017-2019.....	84
Gambar 4.4 Tren Rata-Rata <i>Tax Avoidance</i> Tahun 2017-2019.....	86



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Sampel Penelitian..... 119

LAMPIRAN II Tabulasi Data 120

LAMPIRAN III Uji Statistik Deskriptif..... 123

LAMPIRAN IV Uji Asumsi Klasik..... 124

LAMPIRAN V Regresi Linear Berganda 126

LAMPIRAN VI Curriculum Vitae 127





BAB I

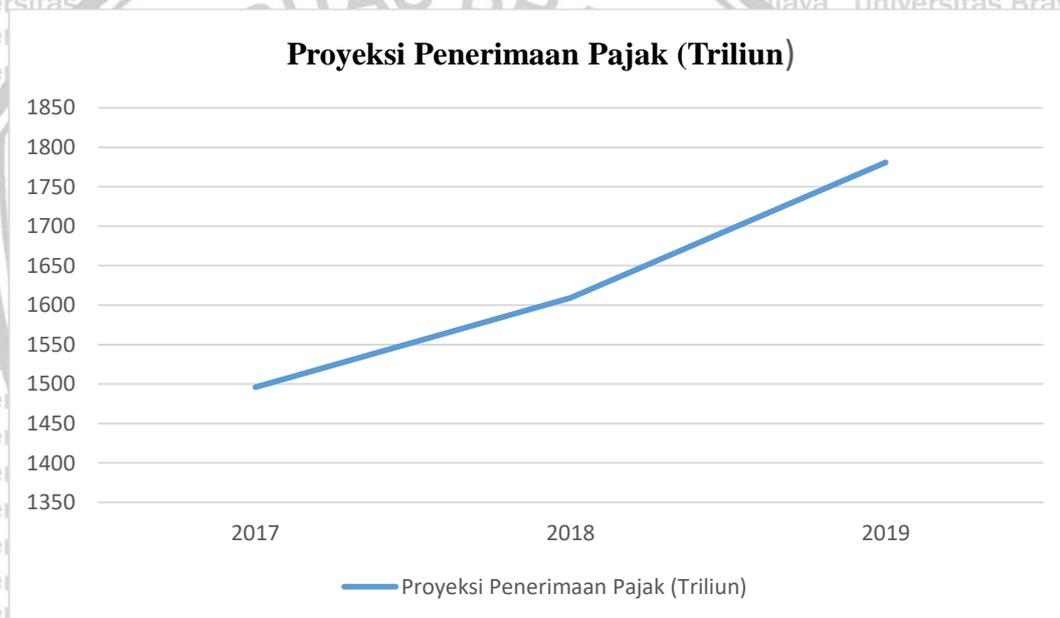
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan perusahaan sebagai wajib pajak badan saat memperoleh penghasilan mempunyai kewajiban untuk menyisihkan sebagian labanya dalam rangka menunaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan regulasi yang sedang berlaku. Pohan (2013:3) dilain sisi menyatakan, motivasi pengusaha adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan *stakeholder* dari perusahaan, dengan cara memperoleh keuntungan yang maksimum guna mengoptimalkan nilai perusahaan. Pajak sendiri merupakan salah satu faktor yang akan menjadi beban yang mengurangi laba bersih atau profit wajib pajak (Pohan, 2013:3). Besarnya pajak sangat tergantung pada besarnya penghasilan, semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula pajak yang terutang (Pohan, 2013:3) Apabila ditinjau dari sudut pandang wajib pajak, wajib pajak yang menyetorkan pajak dengan jumlah yang semakin besar cenderung akan berdampak pada penerimaan profit atau laba bersih yang akan didapatkan wajib pajak tersebut juga semakin berkurang.

Pemerintah disisi lain mempunyai tujuan untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang dan pembangunan tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan dana yang besar (Pohan, 2013:2). Pemerintah membutuhkan penerimaan negara salah satunya dari sektor pajak guna membiayai kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi pajak yaitu fungsi

budgetair, artinya pemerintah menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan dalam rangka mendanai pengeluaran rutin harian maupun mendanai pembangunan (Resmi, 2017:3). Sehingga, pemerintah akan terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan yang dapat diperoleh dari pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari data RAPBN yang menunjukkan terus meningkatnya pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Apabila dilihat dari sudut pandang wajib pajak dan sisi pemerintah maka terdapat perbedaan keperluan dan pandangan antara pihak wajib pajak dan pemerintah dalam menyikapi pajak itu sendiri.



Gambar 1.1 Proyeksi Penerimaan Pajak Berdasarkan RAPBN

Sumber : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Perusahaan akan berusaha mencari cara untuk membayar pajak seminimum mungkin, dilain pihak pemerintah berupaya mengenakan pajak seoptimal mungkin guna meningkatkan penerimaan negara. Menurut Pohan (2013:3) perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak terutang salah satunya dapat mengambil tindakan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Upaya

yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka perencanaan pajak tersebut adalah aktivitas *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan aktivitas *tax evasion* (penyelundupan pajak). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan cara menghindari pengenaan pajak melalui pengalihan transaksi dengan tujuan agar transaksi tersebut digolongkan sebagai bukan objek pajak dan dalam pelaksanaannya hanya memanfaatkan kelemahan pada peraturan perpajakan (Pohan, 2013:11). Penyelundupan pajak merupakan skema perusahaan untuk memperkecil pajak secara ilegal dengan menyembunyikan keadaan perusahaan yang sebenarnya (Pohan, 2013:14).

Agency theory menyebutkan perusahaan terbentuk dari hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik sumber daya) dengan agen (manajemen perusahaan) yang berkewajiban mengelola serta mengendalikan sumber daya (Jensen dan Meckling, 1976). Agen dan prinsipal memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda, yang menyebabkan agen tidak senantiasa bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal (Messier, dkk, 2006:7). Prinsipal menginginkan perusahaannya memiliki keberlangsungan (*going concern*) agar prinsipal dapat terus memperoleh pengembalian modal atas sumber dayanya, sehingga prinsipal tidak akan mengambil resiko untuk melakukan penghindaran pajak yang apabila tidak dilakukan dengan cermat maka akan menimbulkan sanksi hukum (Zulma, 2016). Sedangkan agen memiliki *mindset* untuk memperoleh insentif atas kinerjanya dari prinsipal yang sebagian besar diukur melalui laba sehingga agen cenderung tidak sungkan untuk melakukan penghindaran pajak demi menghasilkan laba perusahaan yang besar (Zulma, 2016).

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat terproksikan salah satunya melalui total aset (Brigham dan Houston, 2014:4).

Perusahaan dengan total aset yang besar dikategorikan sebagai perusahaan dengan ukuran yang besar pula. Berdasarkan teori keagenan, agen didorong untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan tujuan peningkatan dan pertumbuhan perusahaan demi menciptakan minat *shareholder* (Brigham dan Houston, 2004 dalam Rahmawati, 2016:14). Sumber daya perusahaan yang dikelola oleh agen salah satunya adalah aset perusahaan. Rego (2003) dalam Dewi dan Jati (2014:251) menyebutkan, suatu entitas perusahaan yang semakin besar, akan menyelenggarakan transaksi yang lebih banyak serta kompleks dibandingkan perusahaan yang lebih kecil dan hal tersebut dapat dimanfaatkan agen untuk memanfaatkan loopholes yang ada pada setiap transaksi dalam rangka melakukan penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan merujuk kepada kenaikan penjualan serta jasa perusahaan antara penjualan periode berjalan dengan periode sebelumnya dalam bentuk persentase (Carvalho dan Costa, 2014:91). Kuantitas penjualan yang meningkat akan berdampak pada laba usaha yang akan dihasilkan perusahaan juga meningkat. Berdasarkan teori keagenan, agen mempunyai kepentingan untuk memperoleh insentif atas kinerjanya yang diukur dari laba perusahaan (Zulma, 2016). Namun, laba yang semakin besar akan dibebankan dengan pajak yang semakin besar pula (Pohan, 2013:3). Jumlah pajak yang mengalami perubahan tersebut dapat berdampak pada motivasi agen untuk meminimalkan beban pajak

yang akan timbul melalui penghindaran pajak agar tidak mengurangi insentif yang diberikan kepada agen (Masrullah, dkk, 2018).

Agen diperkejakan oleh investor selaku prinsipal dalam menjalankan aktivitas usaha dengan tujuan meningkatkan nilai *shareholder*. *Leverage* digunakan untuk menggambarkan seberapa banyak utang perusahaan membiayai aktivitas perusahaan (Kasmir, 2014:153). Teori *trade off* menyebutkan perusahaan bisa mengorbankan manfaat suatu aspek untuk mendapatkan manfaat lebih pada aspek yang lain (Aisyah, 2012:6). Berdasarkan teori *trade off*, perusahaan dengan jumlah beban pajak yang besar dapat mengorbankan biaya kebangkrutan menjadi lebih tinggi untuk memperoleh manfaat berupa pengurangan pajak (Brigham dan Daves, 2004). Namun, peningkatan utang yang berlebihan akan berimplikasi pada peningkatan biaya keagenan dari utang yaitu biaya kebangkrutan (Jensen, 1986 dalam Rahmawati, 2016:19). Semakin besar utang yang dimiliki oleh perusahaan akan berdampak pada resiko kebangkrutan perusahaan juga akan semakin tinggi (Ross, dkk, 2003:584). Namun, dari sudut pandang agen pendanaan dari utang tersebut dapat dimanfaatkan untuk ditukar dengan beban pajak yang timbul menjadi minimum, sehingga laba yang dihasilkan tidak banyak berkurang (Masrullah, dkk, 2016).

Permasalahan penghindaran pajak yang dimuat Suara (suara.com) dipaparkan oleh Yenny Sucipto Sekertaris Jenderal FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), penghindaran pajak dan penggelapan pajak merupakan salah satu data yang sulit untuk diperoleh publik. Beliau berpendapat, diduga setiap tahun terdapat penghindaran pajak dengan kisaran nominal Rp.110 triliun,

dari angka tersebut sekitar 80% diisi oleh wajib pajak badan usaha dan sisanya wajib pajak perorangan. Jumlah Rp.110 triliun per tahun tersebut membuktikan meskipun pemerintah telah mengatur peraturan perpajakan dengan jelas, pada kenyataannya wajib pajak masih dapat memanfaatkan celah peraturan perpajakan dalam rangka meminimalkan pajak terutang.

Fenomena penghindaran pajak dilaporkan oleh *Tax Justice Network* terjadi di perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi pada tahun 2019 lalu.

Dilansir dari Kontan (kontan.co.id), pada tahun 2019 lalu institusi *Tax Justice Network* membuat laporan telah terjadi indikasi aktivitas *tax avoidance* di

Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang dilakukan oleh perusahaan tembakau milik *British American Tobacco*. Laporan tersebut menjelaskan PT Bentoel melakukan pinjaman kepada *Rothman Far East BV*.

Setelah ditelusuri, dana yang dipinjamkan dari rekening perusahaan tersebut berasal dari perusahaan grup *British American Tobacco* lain yang berpusat di Inggris. Akibat dari pinjaman tersebut, PT Bentoel diharuskan melunasi total bunga atas pinjaman senilai 2,25 triliun rupiah atau 164 juta dollar amerika dan biaya atas bunga tersebut dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia. Seharusnya utang US\$ 164 juta yang dilakukan PT Bentoel dikenakan pajak senilai US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta/tahun untuk jangka waktu tiga tahun.

Penelitian-penelitian penghindaran pajak telah banyak dilakukan, namun hasil penelitian-penelitian tersebut masih tidak konsisten. Seperti penelitian yang dilakukan Dewi dan Jati (2014) yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Darmawan dan Sukartha (2014), Puspita dan Febrianti (2017) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2017), Masrullah, dkk (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, penelitian Marini, dkk (2019) menunjukkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terkait *leverage* terhadap *tax avoidance*, penelitian yang dilakukan Masrullah, dkk (2018) menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, penelitian Darmawan dan Sukartha (2014), Puspita dan Febrianti (2017) menyebutkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Melihat adanya beberapa hasil penelitian yang berbeda-beda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, menjadikan hal ini menarik untuk diteliti kembali. Penelitian ini berusaha untuk mengaitkan pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak melalui teori *trade-off* sebagai kebaruan penelitian.

Perusahaan sektor manufaktur merupakan salah satu penyumbang penerimaan pajak negara. Dilansir dari Kementerian Keuangan (<https://www.kemenkeu.go.id>) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017 lalu, sektor manufaktur menyumbang penerimaan pajak terbesar yaitu sebesar 32% dari keseluruhan penerimaan pajak. Alasan penelitian ini dilakukan pada sektor manufaktur karena berdasarkan APBN tahun 2017 penerimaan pajak pada sektor manufaktur tahun 2017 lalu mengalami pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 17,1% dibandingkan tahun 2016, namun setelah tahun 2017 persentase

pertumbuhan penerimaan pajak pada sektor manufaktur terus menurun. Data APBN tahun 2018 menunjukkan penerimaan pajak sektor manufaktur bertumbuh sebesar 12,74%, persentase pertumbuhan penerimaan pajak tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2017 sebelumnya. Hingga pada akhir tahun 2019, persentase pertumbuhan penerimaan pajak yang tercatat pada APBN kembali menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya hingga ke tahap negatif atau terjadi penurunan penerimaan pajak yaitu sebesar -3,1%.

Sampel penelitian akan difokuskan kepada perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods industry* karena perusahaan *consumer goods industry* mempunyai potensi konsumen yang mencapai 135 juta dan menyumbang 60% sampai 70% kontribusi konsumsi masyarakat indonesia terhadap PDB (depkop.go.id). Hal tersebut berpotensi menghasilkan penjualan yang besar dan memungkinkan perusahaan memperoleh laba yang cukup besar yang menyebabkan pembayaran pajak juga akan semakin besar. Selain itu, perusahaan sub sector *consumer goods industry* merupakan sector yang berkaitan dengan kebutuhan manusia sehari-hari, sehingga menjanjikan menarik minat investor untuk berinvestasi, yang didukung dengan pernyataan Badan Koordinasi Pengelolaan Modal yang menyebutkan selama tahun 2015 hingga tahun 2020 sub sektor *consumer goods industry* merupakan sektor yang paling diminati oleh investor (okezone.com, 2020)

Berdasarkan uraian diatas mengenai peristiwa dan penelitian sebelumnya yang relevan, oleh karenanya peneliti memilih menyelenggarakan riset studi lebih lanjut tentang “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur (Studi Pada

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Consumer Goods Industry* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)".

I.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas yaitu :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan dari identifikasi rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*;
2. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*;
3. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*;
4. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* secara simultan terhadap *tax avoidance*.

I.4 Kontribusi Penelitian

I.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diselenggarakan dengan harapan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan pengetahuan yang mengkonfirmasi keterkaitan teori keagenan dan *teori trade off* dalam pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* pada *tax avoidance* di sub sektor *consumer goods industry*. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian yang sejenis.

I.4.2 Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memahami celah peraturan perundang-undangan pajak penghasilan yang sering dimanfaatkan untuk penghindaran pajak di Indonesia, sehingga pemerintah dapat merumuskan dan mengimplementasikan sistem perpajakan yang lebih efektif dan terintegrasi agar dapat menutupi celah yang masih bisa dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan penghematan pajak penghasilan secara ekstrim.

I.4.3 Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan wawasan bagi pihak prinsipal perusahaan khususnya perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods industry* dalam menganalisis kinerja pengelola perusahaan melalui laporan keuangan. Sehingga, analisis mengenai kinerja perusahaan dapat melibatkan unsur-unsur perpajakan penghasilan tidak hanya unsur-unsur kelancaran arus kas dan pencapaian laba saja sehingga perusahaan dapat mengambil kebijakan yang tepat terkait efisiensi beban pajak.

I.5 Sistematika Penelitian

Peneliti menggunakan sistematika penelitian untuk mempermudah pembaca dalam menggunakan skripsi ini. Peneliti merinci sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pertama dalam penelitian ilmiah ini akan memaparkan mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang dilaksanakannya penelitian, permasalahan yang menjadi fokus penelitian, tujuan, kontribusi, dan sistematika penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian kedua dalam penelitian ilmiah ini akan memaparkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya, bagian ini akan menjelaskan juga mengenai landasan teori, model konsep, dan rumusan hipotesis yang digunakan oleh peneliti pada riset studi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

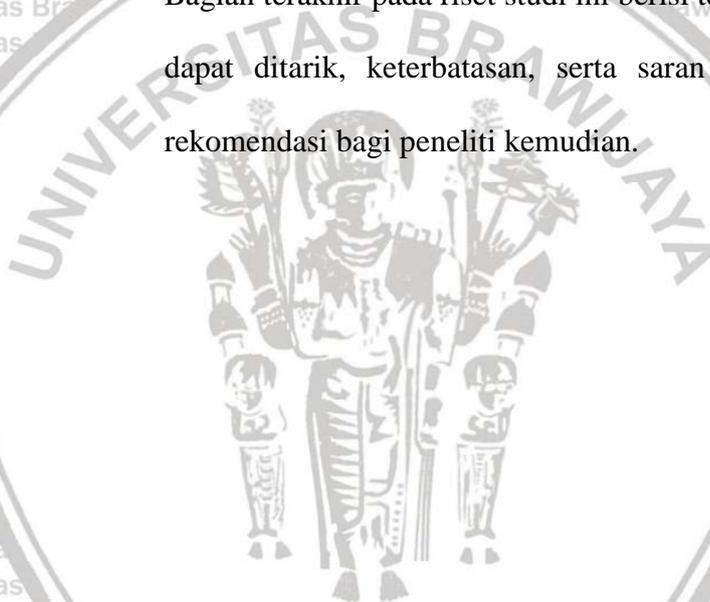
Bagian ketiga dalam riset studi ini memaparkan tentang penjelasan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti. Didalamnya memuat diantaranya jenis, lokasi, data penelitian, populasi serta sampel yang diteliti, terakhir teknik pengumpulan dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian keempat dalam penelitian ini memuat interpretasi dan analisis peneliti atas output pengolahan data. Analisis dan interpretasi data yang dilakukan akan mempersembahkan jawaban sehubungan permasalahan dari riset studi ini apakah telah sesuai dengan hipotesis peneliti atau tidak, serta mempersembahkan penjelasan atas hasil tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bagian terakhir pada riset studi ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik, keterbatasan, serta saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi peneliti kemudian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 TINJAUAN EMPIRIS

Peneliti menyadari pentingnya referensi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai salah satu komponen penunjang pada penelitian ini.

Penelitian terdahulu digunakan dengan harapan akan mempermudah dalam penyusunan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, serta *leverage* terhadap *tax avoidance* dijadikan referensi pada riset studi ini. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. N.N. Dewi dan I K. Jati (2014)

Pada tahun 2014 Dewi dan Jati melaksanakan penelitian dengan topik “Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada *Tax Avoidance* Di Bursa Efek Indonesia”. Sebanyak 144 data *financial report* yang berasal dari 36 perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI Tahun 2009 hingga 2012 dijadikan sampel pada penelitian. Metode non-probabilitas dengan teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan, ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Darmawan dan Sukartha (2014)

Penelitian pada tahun 2014 yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha dengan judul “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, *Leverage*, *Return On*

Asset, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak”. Sebanyak 165 data laporan keuangan dari 55 perusahaan CGPI yang tercatat di BEI pada tahun 2010 hingga 2012 dijadikan sampel penelitian. Sampel diperoleh melalui teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Hasil penelitian membuktikan *leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. D. Puspita dan M. Febrianti (2017)

Penelitian selanjutnya yang peneliti jadikan referensi adalah penelitian oleh Puspita dan Febrianti pada tahun 2017, dengan topik penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”. Sebanyak 156 sampel data laporan keuangan dari 52 perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2012 hingga 2014 diteliti. Sampel ditentukan melalui metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan *sales growth* memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Disisi lain *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Masrullah, Mursalim, Muhammad Su'un (2018)

Pada tahun 2018 Masrullah, Mursalim, dan Su'un melakukan penelitian dengan topik “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Leverage*, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”. Sebanyak 54 data *financial report* dari 18 perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang tercatat di BEI tahun 2014 hingga 2016 dijadikan sampel penelitian. Penentuan sampel dilakukan

dengan melalui metode non-probabilitas dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

5. Marini, Fatahurrazak, dan Sri Ruwanti (2019)

Penelitian yang dijadikan referensi adalah riset oleh Marini, Fatahurrazak, dan Sri Ruwanti pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017”. Sebanyak 60 data *financial report* dari 15 perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tercatat di BEI selama periode 2014 hingga 2017 dijadikan sampel dalam riset ini, dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA PENULIS JURNAL	TAHUN JURNAL	JUDUL JURNAL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati	2014	"Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada <i>Tax Avoidance</i> Di Bursa Efek Indonesia"	1. Variabel Independen : Ukuran Perusahaan 2. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> 3. Objek Penelitian : Perusahaan Manufaktur	Penelitian terdahulu : 1. Objek yang diteliti merupakan perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009 hingga 2012; 2. Tidak meneliti variabel independen pertumbuhan penjualan dan <i>leverage</i> . 3. Menggunakan Teori Keagenan Penelitian saat ini : 1. Objek yang diteliti difokuskan pada perusahaan manufaktur sub sektor <i>consumer goods industry</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2019; 2. Meneliti <i>leverage</i> dan pertumbuhan penjualan 3. Menggunakan Teori Keagenan dan Teori <i>Trade Off</i>
2	I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha	2015	"Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak"	1. Variabel Independen : Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> 2. Variabel Dependen : Penghindaran Pajak 3. Objek Penelitian :	Penelitian terdahulu : 1. Objek yang diteliti merupakan perusahaan peringkat CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 hingga tahun 2012 2. Tidak Meneliti Variabel Pertumbuhan

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA PENULIS JURNAL	TAHUN JURNAL	JUDUL JURNAL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
				Perusahaan Manufaktur	<p>Penjualan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>3. Menggunakan Teori Keagenan dan Teori Kekuasaan Politik</p> <p>Penelitian saat ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> Objek yang diteliti perusahaan sub sektor <i>consumer goods industry</i> yang tercatat di BEI periode 2017-2019; Tidak meneliti ROA dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. Menggunakan Teori Keagenan dan Teori <i>Trade Off</i>
3	Deanna Puspita dan Meiriska Febrianti	2017	"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia."	<ol style="list-style-type: none"> Variabel Bebas : Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, <i>Sales Growth</i> Variabel Terikat : <i>Tax Avoidance</i> Objek Penelitian : Perusahaan Manufaktur Metode <i>Sampling</i> : <i>Purposive Sampling</i> 	<p>Penelitian terdahulu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meneliti <i>return on asset</i>, intensitas modal, dan komposisi komisaris sebagai variabel bebas; Objek penelitian perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2012-2014. Menggunakan Teori Keagenan <p>Penelitian saat ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak meneliti <i>return on asset</i>, intensitas modal, dan komposisi komisaris; Objek yang diteliti perusahaan

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA PENULIS JURNAL	TAHUN JURNAL	JUDUL JURNAL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
					manufaktur sub sektor <i>consumer goods industry</i> yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. 3. Menggunakan Teori Keagenan dan Teori <i>Trade Off</i>
4	Masrullah, Mursalim, Muhammad Su'un	2018	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia	1. Variabel Independen : Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i> 2. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> 3. Objek Penelitian : Perusahaan Manufaktur 4. Metode Sampling : <i>Purposive Sampling</i>	Penelitian terdahulu : 1. Meneliti perusahaan sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 hingga tahun 2016. 2. Tidak Meneliti Variabel Ukuran Perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Menggunakan Teori Keagenan dan Teori Stakeholder Penelitian saat ini : 1. Meneliti perusahaan sub sektor <i>consumer goods industry</i> yang tercatat di BEI periode 2017-2019; 2. Tidak meneliti variabel Komisaris Independen terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Menggunakan Teori Keagenan dan Teori <i>Trade Off</i>
5	Marini, Fatahurrizak, dan	2019	"Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas	1. Variabel Independen : Pertumbuhan Penjualan	Penelitian terdahulu : 1. Meneliti intensitas modal terhadap <i>tax</i>

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA PENULIS JURNAL	TAHUN JURNAL	JUDUL JURNAL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Sri Ruwanti		Modal Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Leverage</i> sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017”	2. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> 3. Objek Penelitian : Perusahaan Manufaktur 4. Metode Sampling : <i>Purposive Sampling</i>	<i>avoidance</i> ; 2. Tidak meneliti ukuran perusahaan dan <i>Leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Periode yang diteliti tahun 2017-2019 4. Menggunakan Teori Keagenan Penelitian saat ini : 1. Tidak meneliti Intensitas Modal terhadap <i>tax avoidance</i> ; 2. Periode yang diteliti tahun 2017-2019 3. Meneliti ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> 4. Menggunakan Teori Keagenan dan Teori <i>Trade Off</i>

Sumber : Diolah peneliti, 2020

II.2 TINJAUAN TEORITIS

II.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) menuturkan, perusahaan sebagai sebuah hubungan kontraktual antara pemilik sumber daya (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*) yang berkewajiban mengelola serta mengendalikan sumber daya. Kontrak perhubungan tersebut terbentuk saat *agent* diberikan kewenangan oleh *principal* untuk mengelola perusahaan atas nama *principal*. Konsep hubungan antara prinsipal dan agen adalah inti dari *agency theory*, prinsipal membuat kontrak kerja dengan agen demi kepentingan dan tujuan prinsipal sehingga prinsipal memberikan kewenangan pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan yang diinginkan prinsipal (Supriyono, 2018:63). Kontrak kerja tersebut dibuat secara lengkap sehingga kedua pihak dapat mengakomodasi kepentingannya, akan tetapi kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang saling bertentangan sehingga muncul konflik kepentingan (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik kepentingan yang dimaksud terjadi ketika *principal* mempekerjakan agen dalam menjalankan aktivitas usaha dengan tujuan meningkatkan nilai *shareholder*. Namun, dalam perjalanannya aktivitas perusahaan yang diambil para agen lebih bertujuan untuk kepentingan agen (Jensen dan Meckling, 1976).

Messier dkk. (2006:7) menjelaskan bahwa dalam teori keagenan hubungan prinsipal dan agen dapat mengakibatkan dua permasalahan. Permasalahan pertama adalah terjadinya konflik kepentingan. Permasalahan tersebut terjadi akibat adanya tujuan yang tidak sama, dimana prinsipal menginginkan perusahaannya

memiliki keberlangsungan agar dapat meningkatkan nilai kesejahteraan *shareholder*, sedangkan agen menginginkan pemberian insentif atas pekerjaan yang telah dilakukannya dan cenderung diukur dari laba yang perusahaan peroleh (Zulma, 2016). Menurut Brigham dan Houston (2004) dalam Rahmawati, (2016:13), prinsipal menginginkan pengembalian modal atas investasinya yaitu pendistribusian kas dari operasional perusahaan yang berupa deviden, sedangkan agen lebih berorientasi pada penciptaan skala besar perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi karena akan memberikan agen kekuatan, status, dan gaji yang lebih besar. Hal tersebut menimbulkan pihak agen (*company manager*) tidak senantiasa bertindak selaras dengan keinginan prinsipal (*company owner*). Permasalahan kedua adalah terjadinya informasi asimetris, dimana manajemen perusahaan (agen) lebih banyak memiliki informasi mengenai laporan keuangan dan laporan operasi dibandingkan pemilik perusahaan (Rahmawati, 2016:9).

Adverse selection serta *moral hazard* ialah permasalahan asimetri informasi yang timbul disebabkan adanya konflik keagenan (Scott, 2009) *Adverse Selection* merupakan suatu kondisi dimana para agen (*company manager*) mengetahui informasi perusahaan (seperti keadaan dan prospek perusahaan) lebih baik dibandingkan para prinsipal (*company owner*). Namun, agen hanya memberikan informasi kepada prinsipal seperlunya dan tidak menyampaikan informasi penting lainnya yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. *Moral Hazard* merupakan suatu kondisi dimana prinsipal tidak memahami setiap langkah yang diambil oleh agen, akibatnya para agen bisa saja mengambil langkah-langkah

yang mungkin melanggar kontrak dan etika yang berlaku diluar pengetahuan para prinsipal.

Menurut Rahmawati (2016:2) asimetri informasi memberikan kesempatan pada agen untuk melakukan tindakan oportunis yaitu mengutamakan kepentingan pribadi agen yang dipicu dari adanya nilai aliran kas bebas (*free cash flow*).

Prinsipal sebagai pihak yang memiliki sumber daya modal mengharapkan pengembalian atas investasinya dari operasional perusahaan yang berupa deviden.

Namun, agen sebagai pihak yang memiliki informasi lebih detail dibandingkan prinsipal sering mengambil tindakan menguntungkan pribadi agen menggunakan sumber daya perusahaan seperti seperti merger, manajemen laba, dan lainnya.

Fama dan Jensen (1983) dalam Rahmawati (2016:14) menyebutkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat dikurangi menggunakan biaya agensi yang terdiri dari biaya untuk pengawasan (*monitoring*), biaya untuk membatasi tindakan agen (*bonding*), dan biaya untuk *residual loss* (kerugian yang timbul meskipun sudah dilakukan monitoring dan bonding. Menurut Sutedi (2012:17)

Adanya benturan kepentingan atau *conflict of interest* memicu timbulnya beberapa jenis biaya agensi, diantaranya :

1. “Biaya yang timbul akibat ketidakefisienan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak agen;
2. Biaya yang timbul karena dilakukannya pembatasan bagi kegiatan agen oleh prinsipal;
3. Biaya yang timbul akibat pilihan proyek agen yang tidak sama dengan pilihan yang dilakukan oleh prinsipal karena resiko meruginya tinggi;
4. Biaya yang timbul karena dilakukannya monitoring atau pengawasan kinerja dan perilaku agen oleh prinsipal”

II.2.2 Teori Trade Off

Teori *trade off* menurut Aisyah (2012:6) adalah kondisi ketika suatu entitas membuat keputusan untuk mengorbankan suatu manfaat atau kualitas suatu aspek tertentu demi meningkatkan manfaat atau kualitas aspek yang lain. Myers (1984) dalam Aisyah (2012:6) menyebutkan tujuan dari teori *trade off* adalah menyeimbangkan modal sendiri dengan modal dari pihak eksternal. Apabila manfaat penggunaan utang masih besar, maka utang akan ditambah. Sebaliknya, penggunaan utang yang menimbulkan biaya kebangkrutan yang lebih besar, maka utang tidak lagi optimal untuk ditambah. Berdasarkan Brigham dan Daves (2004) menyebutkan, teori *trade off* menunjukkan adanya keseimbangan antara manfaat penghematan pajak melalui pendanaan utang yang mengakibatkan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi akibat penggunaan utang. Perusahaan dengan jumlah beban pajak yang besar dapat mengorbankan biaya kebangkrutan menjadi lebih tinggi untuk memperoleh manfaat berupa pengurangan pajak (Brigham dan Daves, 2004).

Teori *trade off* menjelaskan bahwa perusahaan yang membayar pajak dengan jumlah besar sebaiknya lebih banyak menggunakan utang dibandingkan dengan perusahaan yang membayar pajak rendah (Aisyah, 2012:18). Penggunaan utang tersebut harus tetap diperhitungkan dan dipertimbangkan karena semakin banyak utang perusahaan maka semakin tinggi juga beban yang harus ditanggung perusahaan yang berupa biaya kebangkrutan, biaya keagenan, dan biaya bunga.

Menurut Azazi (2008) dalam memilih struktur modal optimal, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan manfaat dan biaya antara liabilitas dengan ekuitas.

Aisyah (2012:19) menyebutkan penggunaan utang bagi perusahaan mengandung tiga dimensi yaitu :

1. “Pemberi kredit akan menitikberatkan pada besarnya jaminan atas kredit yang diberikan
2. Dengan menggunakan utang maka apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka keuntungan akan meningkat
3. Dengan menggunakan utang maka pemilik memperoleh dana dan tidak beresiko kehilangan pengendalian perusahaan.”

Pada prinsipnya, penggunaan utang untuk memanfaatkan aspek lain dapat meningkatkan biaya kebangkrutan perusahaan. Ross *et. al* (2003:584) menyatakan semakin besar utang yang dimiliki oleh perusahaan akan berdampak pada resiko kebangkrutan perusahaan juga akan semakin tinggi, perusahaan dikatakan bangkrut saat nilai dari aktiva sama dengan nilai dari utangnya. Namun, aliran kas dari utang dan ekuitas dikenakan pajak yang berbeda oleh pemerintah, karena biaya bunga dapat mengurangi pembayaran pajak sedangkan deviden tidak. Bunga yang dibayarkan dapat dijadikan sebagai beban pengurang pajak menyebabkan pendanaan dari utang menjadi lebih murah dibandingkan pendanaan dari modal (Azazi, 2008).

II.2.2 Pajak

UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai iuran yang harus dibayarkan kepada negara oleh perorangan atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak dikompensasikan secara langsung dan dialokasikan untuk membiayai kesejahteraan rakyat. Pajak ialah iuran yang wajib disetorkan masyarakat ke kas negara sesuai dengan regulasi perpajakan dan rakyat tidak seketika mendapat

kompensasi, serta iuran tersebut ditujukan dan dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan umum (Soemitro dalam Resmi, 2017:1). Kedua pengertian diatas dapat memberikan kesimpulan bahwa karakteristik pajak yaitu dipungut sesuai dengan ketentuan undang-undang, memiliki sifat memaksa, tidak seketika mendapatkan kompensasi secara langsung, dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan rakyat.

Pajak memainkan peran yang sangat penting bagi Indonesia, sebab saat ini pajak merupakan kontributor pendapatan terbesar Indonesia. Menurut Mardiasmo (2013:2), pajak memiliki dua fungsi esensial yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*. Fungsi *budgetair* memiliki arti bahwa pajak adalah salah satu sumber dana terbesar bagi pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran negara. Fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah pada aspek ekonomi dan sosial serta untuk mewujudkan target lain diluar aspek keuangan disebut fungsi *Regularend*.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menurut Resmi (2017:10-11) dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. *“Official Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan memungutnya dari wajib pajak setiap tahunnya berdasarkan perundang-undangan perpajakan.
2. *Self Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dan menyetorkannya sendiri setiap tahunnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. *With Holding System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga selain aparat perpajakan dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.”

Atas pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pajak diperlukan pemerintah untuk menjadi sumber penghasilan dalam membiayai pengeluaran rutin serta pembiayaan pembangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Pemerintah juga memberi kebebasan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai regulasi perpajakan yang sedang berlaku.

II.2.3 Perencanaan Pajak

Ompusunggu (2011:3) menyebutkan, perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. *Tax avoidance* merupakan langkah awal dari pengelolaan pajak, pada fase perencanaan pajak, entitas mengumpulkan dan mempelajari aturan perpajakan, kemudian entitas akan menyeleksi berbagai macam tindakan yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka efisiensi pajak terutang (Suandy, 2016:7). Manfaat yang dapat wajib pajak peroleh melalui perencanaan pajak adalah penghematan kas keluar, dan mengatur aliran kas sehingga anggaran dapat disusun dengan lebih akurat (Mangoting, 1999 dalam Astutik dan Mildawati, 2016). Perencanaan pajak yang baik harus dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan, harus masuk akal dari segi bisnis (*reasonable*), dan harus didukung oleh bukti pendukung yang cukup untuk mendukung tindakan yang dilakukan (Pohan, 2013:21-22).

Suandy (2008) dalam Astutik dan Mildawati (2016) menyebutkan terdapat beberapa cara yang digunakan wajib pajak dalam perencanaan pajak yaitu *tax shifting* (pergeseran pajak), kapitalisasi, transformasi, *tax evasion* (penyelundupan pajak), dan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Pohan (2013:14)

menyebutkan bahwa penyelundupan pajak (*tax evasion*) merupakan metode penghindaran pajak yang diterapkan secara ilegal sehingga tidak aman bagi wajib pajak, serta cara ini melanggar regulasi perpajakan yang sedang berlaku karena siasat yang digunakan sudah tidak lagi dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan. Disisi lain, *Tax Avoidance* berbeda dengan penyelundupan pajak, penghindaran pajak diterapkan dengan legal dan sah untuk wajib pajak karena masih dalam ruang lingkup regulasi perpajakan yang sedang berlaku (Pohan, 2013:14). Penghindaran pajak hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak melalui pemanfaatan celah dan kelemahan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan perpajakan (Pohan, 2013:14).

Pohan (2013:18-19) berpendapat secara umum motivasi suatu entitas dalam melakukan perencanaan pajak adalah guna memaksimalkan laba setelah pajak.

Pohan (2013:18-19), menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi motivasi wajib pajak menerapkan perencanaan pajak baik secara legal maupun ilegal, yaitu :

1. “Tingkat kerumitan suatu peraturan pajak
Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi menjadi tinggi
2. Besarnya pajak yang dibayar
Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya
3. Biaya untuk negosiasi
Wajib pajak terkadang melakukan negosiasi dan memberikan sejumlah uang kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran
4. Resiko deteksi
Makin rendah resiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan

5. Besarnya denda

Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

6. Moral masyarakat

Moral masyarakat dalam hal kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya juga merupakan salah satu motivasi aktivitas perencanaan pajak”.

II.2.4 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), secara umum penghindaran pajak merupakan segala jenis aktivitas transaksi yang dapat berdampak terhadap penurunan kewajiban pajak perusahaan. Penghindaran pajak menurut Pohan (2013:23) merupakan upaya wajib pajak untuk mengefisienkan pajak terutangnya yang dilakukan secara legal dalam hukum, karena wajib pajak tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan regulasi perpajakan. Wajib pajak hanya memanfaatkan celah atau *loopholes* yang menjadi kelemahan dan terdapat dalam regulasi perpajakan yang berlaku untuk meminimalkan beban pajak dengan cara mengalihkan transaksi sehingga termasuk transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2013:11).

Mardiasmo (2011:8) mengemukakan bahwa aktivitas penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk mengefisienkan beban pajaknya, sehingga pajak yang harus disetorkan menjadi dapat diminimalkan dengan langkah-langkah yang tidak melanggar regulasi dan ketentuan undang-undang. Penghindaran pajak dan penyelundupan pajak memiliki batasan yang membedakan satu sama lainnya.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) mengacu kepada *tax affairs manipulation* yang masih dalam lingkup kerangka perundang-undangan perpajakan, sedangkan

penyelundupan pajak (*tax evasion*) sudah berada diluar bingkai perundang-undangan perpajakan (James dan Nobes, 1983 dalam Suandy 2016:6).

Penghindaran pajak di Indonesia didukung oleh lemahnya aturan perpajakan di Indonesia yang semakin membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak melalui celah aturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2003 dalam Zulma, 2016). Aktivitas penghindaran pajak apabila tidak dilakukan dengan cermat maka dapat menimbulkan resiko sanksi hukum dan sanksi denda bagi wajib pajak (Zulma, 2016). Meskipun demikian manfaat penghematan pajak yang didapat oleh wajib pajak melalui *tax avoidance* cukup menggiurkan bagi perusahaan (Zulma, 2016).

Menurut Hasan, dkk (2013) terdapat 2 perspektif pemangku kepentingan dalam menyikapi penghindaran pajak. Pemberi pinjaman (*debt holder*) akan merespon buruk penghindaran pajak karena beresiko terhadap masa depan perusahaan, sedangkan pemegang saham (*shareholder*) justru merespon positif penghindaran pajak karena dapat meningkatkan laba perusahaan yang akan memberikan pengembalian modal lebih kepada pemegang saham. Darussalam dan Septriadi (2009) menyatakan bahwa skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*).

Tindakan penghindaran pajak yang diperbolehkan bukan sekedar untuk menghindari pajak, memiliki tujuan usaha yang baik serta tidak melakukan transaksi yang direkayasa. Sedangkan, tindakan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dilakukan semata-mata untuk menghindari pajak, tidak memiliki

tujuan usaha yang baik dan melakukan transaksi rekayasa agar pos biaya terlihat lebih besar dari aslinya (Darussalam dan Septriadi, 2009).

Secara umum, penghindaran pajak selalu diawali dengan memastikan suatu aktivitas terkena pungutan pajak atau tidak, apabila aktivitas tersebut dikenakan pungutan pajak apakah aktivitas tersebut dapat diusahakan oleh wajib pajak untuk dibebaskan atau dikurangi jumlah pajak terutang, selanjutnya apakah pembayaran pajak atas aktivitas tersebut dapat ditunda atau tidak pembayarannya (Suandy, 2016:10). Merks (2007) dalam Oktamawati (2017:26) menyebutkan bahwa perusahaan dapat meringankan beban pajak melalui tindak penghindaran pajak melalui berbagai strategi yaitu :

1. “Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan;
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah;
3. Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *treaty shopping*, dan transaksi lainnya dengan pihak yang tidak mempunyai substansi bisnis (Merks, 2007 dalam Oktamawati, 2017:26).”

Hal tersebut sesuai yang dijelaskan pada Darussalam dan Septriadi (2009) beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban perpajakan melalui penghindaran pajak adalah :

1. “*Substantive tax planning* : penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara mentransfer subjek dan objek pajak ke negara *tax heaven* atau pemerintah yang memberikan perlakuan pajak khusus
2. *Formal tax planning* : penghindaran pajak dengan cara mempertahankan substansi ekonomi pada transaksi dengan memilih jenis transaksi yang memberikan pajak rendah
3. *Anti tax avoidance regulation* : penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan transaksi *transfer pricing*, *treaty shopping*, dan tidak melakukan berbagai praktik perpajakan yang dilarang.”

Terdapat 3 tipe karakteristik penghindaran pajak yang diungkapkan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) *fiscal affairs committee* dalam Suandy (2016:10), yaitu :

1. “Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak
2. Skema semacam ini seringkali memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang
3. Terdapat unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut akan menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaan tersebut serahasia mungkin”

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), terdapat 12 teknik cara pengukuran *tax avoidance*. Cara pengukuran tersebut diantaranya adalah *GAAP ETR*, *Current ETR*, *Cash ETR*, *Long Run Cash ETR*, *ETR Differential*, *DTAX*, *Total BTD*, *Temporary BTD*, *Abnormal total BTD*, *Unrecognized Tax Benefit*, *Tax Shelter*,

dan *Marginal Tax Rate*. Salah satu cara untuk menghitung estimasi *tax avoidance*

(penghindaran pajak) adalah *Cash Effective Tax Rate* (*Cash ETR*). *Cash ETR*

ialah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak

(Puspita dan Febrianti, 2017). *Cash ETR* dipilih sebagai cara mengestimasi *tax*

avoidance karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi

seperti adanya perlindungan pajak (Dyrenge, dkk, 2010 dalam Puspita dan

Febrianti, 2017). Adapun persamaan *Cash ETR* adalah sebagai berikut :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Laba Yang Dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

II.2.5 Ukuran Perusahaan

Perusahaan merupakan sebuah entitas yang dibentuk dan beroperasi dengan dasar tujuan menghasilkan profit melalui penjualan barang dan/atau jasa kepada para *customer* (Hery, 2015:1). Secara umum perusahaan beroperasi dengan tujuan memaksimalkan profit yang diperoleh. Menurut Hery (2015:1-2), perusahaan apabila ditinjau dari jenis usahanya dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis perusahaan yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Definisi tiap perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **“Perusahaan Manufaktur**, perusahaan jenis ini terlebih dahulu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, baru kemudian dijual kepada para pelanggan. Contoh perusahaan manufaktur adalah perusahaan rokok, perusahaan pembuat obat, perusahaan pembuat sepatu.
2. **Perusahaan Dagang**, perusahaan ini menjual barang jadi, namun perusahaan ini tidak memproduksi sendiri produk yang akan dijualnya melainkan memperolehnya dari perusahaan lain. Contoh perusahaan dagang adalah Carrefour, Alfamart, Gramedia, Indomaret.
3. **Perusahaan Jasa**, perusahaan ini tidak menjual barang tetapi menjual jasa kepada pelanggannya. Contoh perusahaan jasa adalah perusahaan jasa konsultan, perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi, perusahaan telekomunikasi”. (Hery, 2013:1-2)

Ukuran perusahaan mengacu pada besar kecilnya skala sebuah perusahaan yang diprosikan dengan melihat jumlah aktiva, jumlah penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain (Brigham dan Houston, 2010:4). Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005:138) mengartikan ukuran perusahaan sebagai skala yang dapat mengklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan melalui berbagai macam cara. Hasibuan (2009) dalam Sari, Kalbuana, dan Jumadi (2016:433) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan skala klasifikasi ukuran perusahaan yang bisa diestimasi dengan berbagai cara antara lain jumlah aktiva, *log size*, penjualan, dan lain-lain.

Indonesia mengatur ukuran perusahaan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi masing-masing ukuran usaha yang diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan kekayaan bersih atau penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan operasional di Indonesia.”

Tabel 2.2 Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Total Asset (Tidak Termasuk Bangunan Tempat Usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	≤Rp. 50 juta	≤Rp. 300 Juta
Usaha Kecil	>Rp. 50 juta–Rp.500 juta	>Rp. 300 Juta–Rp. 2,5 Milyar
Usaha Menengah	>Rp. 500 juta–Rp.10 milyar	>Rp. 2,5 Milyar–Rp. 50 Milyar
Usaha Besar	>Rp. 10 milyar	>Rp. 50 Milyar

Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Tabel diatas merupakan tolak ukur masing-masing ukuran perusahaan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM tersebut. Atas definisi yang disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan

bahwa ukuran suatu perusahaan pada hakikatnya terdiri dari perusahaan besar, perusahaan kecil, dan perusahaan menengah yang dapat diproksikan melalui jumlah aktiva, jumlah penjualan, dan jumlah profit yang dihasilkan. Berdasarkan tolak ukur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut mengindikasikan apabila jumlah aktiva perusahaan semakin besar, maka ukuran perusahaan akan menjadi semakin besar juga. Perusahaan besar maupun perusahaan kecil sama-sama menganggap bahwa pajak merupakan beban bagi perusahaan, karena dapat mengurangi laba bersih yang bisa perusahaan dapatkan (Rego, 2003). Namun, ukuran perusahaan yang semakin besar akan berdampak pada transaksi yang dilakukan perusahaan juga akan menjadi lebih kompleks (Rego dalam Dewi dan Jati, 2014). Hal tersebut membuka kemungkinan bagi perusahaan dalam memanfaatkan *loopholes* yang ada untuk mengambil langkah-langkah penghindaran pajak pada tiap-tiap transaksi perusahaan yang kompleks tersebut (Dewi dan Jati, 2014).

Murhadi (2013), menyebutkan bahwa ukuran perusahaan atau *firm size* dapat ditaksir dengan memproksikan jumlah aktiva yang perusahaan miliki kedalam logaritma natural. Melalui logaritma natural perusahaan yang memiliki aktiva bernilai ratusan milyar hingga triliun dapat disederhanakan tanpa mengubah proporsi jumlah aktiva yang sesungguhnya. Adapun untuk menghitung ukuran perusahaan menggunakan logaritma natural menurut Murhadi (2013) adalah sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Aktiva})$$

Aktiva menurut Budiman (2018:5), merupakan keseluruhan harta yang perusahaan perusahaan miliki seperti uang kas, piutang, persediaan barang dagang, mesin-mesin, gedung atau properti dan lain-lain. Hidayat (2012:4) menyebutkan bahwa aktiva merupakan barang atau benda yang bergerak maupun tidak bergerak, memiliki wujud maupun tidak memiliki wujud yang dikuasai instansi, organisasi, dan badan usaha. Aktiva terbagi kedalam 2 (dua) kategori yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar, Ruang lingkup aktiva lancar meliputi kas dan aktiva lainnya yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam satu tahun atau satu siklus operasional perusahaan dengan mempertimbangkan mana yang paling lama. Selanjutnya, ruang lingkup aktiva tidak lancar merupakan aktiva yang mencakup berbagai pos, yaitu investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud yang dimiliki oleh suatu entitas (Hery,2015:92).

II.2.6 Pertumbuhan Penjualan

Penjualan merupakan suatu usaha yang dilaksanakan penjual untuk menjual produk dan layanan dengan tujuan untuk menghasilkan profit dari berlangsungnya transaksi tersebut, penjualan bisa didefinisikan sebagai pelimpahan hak milik atas produk atau layanan dari penjual ke pembeli (Mulyadi, 2016:10). Aktivitas penjualan sendiri terdiri dari transaksi penjualan produk dan/atau layanan yang dapat diklasifikasikan kedalam penjualan kredit dan penjualan tunai (Mulyadi, 2008:210). Penjualan tunai merupakan bentuk penjualan dimana perusahaan mengharuskan pembeli untuk membayar harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum dilakukan penyerahan barang kepada pembeli, sedangkan

penjualan kredit merupakan bentuk penjualan dimana perusahaan mengirimkan barang terlebih dahulu sesuai permintaan pembeli sehingga pihak perusahaan memiliki tagihan yang dapat ditagih kepada pembeli untuk jangka waktu tertentu (Mulyadi, 2008:210).

Pertumbuhan menurut Harahap (2013:309), mengacu pada rasio persentase ekskalasi pos-pos laporan keuangan suatu entitas dari tahun sebelumnya yang terdiri atas penambahan penjualan, laba bersih, *earning per share*, hingga penambahan deviden per *share*. Pertumbuhan penjualan merujuk kepada kenaikan penjualan serta jasa perusahaan antara penjualan periode t dengan penjualan periode $t-1$ dalam bentuk persentase (Carvalho dan Costa, 2014:91). Pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit atau laba (Baumgartner Hatami *et.al*, 2016:116). Menurut Subramanyam (2014), pertumbuhan penjualan adalah analisis tren penjualan berdasarkan segmen yang berguna dalam menilai profitabilitas.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan menggambarkan kenaikan volume penjualan dari tahun ke tahun yang dapat mencerminkan tingkat laba. Pertumbuhan penjualan berperan penting dalam pengelolaan modal kerja karena melalui pertimbangan penjualan dari tahun sebelumnya entitas perusahaan dapat mengintensifkan sumber daya dengan baik (Dewinta dan Setiawan, 2016:1592). Kesuksesan investasi perusahaan pada periode sebelumnya dapat dicerminkan melalui pertumbuhan penjualan, selain itu pertumbuhan penjualan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan perusahaan dimasa mendatang (Hidayat, 2018:21).

Pertumbuhan penjualan memegang peranan krusial bagi perusahaan, karena omset penjualan menjadi ujung tombak kinerja dari entitas perusahaan (Budiman, 2018:38). Kasmir (2012:107) menyebutkan bahwa, pertumbuhan penjualan dapat mencerminkan seberapa besar perusahaan dapat menaikkan penjualannya dibandingkan dengan jumlah penjualan secara keseluruhan. Fahmi (2014) dalam Hidayat (2018:21) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan rasio antara penjualan periode berjalan dikurangi penjualan periode sebelumnya lalu dibandingkan dengan penjualan periode sebelumnya. Pengukuran pertumbuhan penjualan dapat dilakukan melalui perhitungan penjualan akhir periode dikurangi dengan penjualan awal periode, lalu dibagi dengan penjualan awal periode (Bardertscher, dkk, dalam Puspita dan Febrianti, 2017). Adapun pengukuran yang digunakan untuk perhitungan pertumbuhan penjualan pada riset studi ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan Akhir Periode} - \text{Penjualan Awal Periode}}{\text{Penjualan Awal Periode}}$$

II.2.7 Leverage

Rasio keuangan adalah rasio yang membandingkan bilangan yang tertera dalam *financial report*, rasio keuangan membandingkan antara komponen yang satu dengan komponen lain dalam satu *financial report* (Kasmir, 2015:104). Rasio keuangan ialah angka dari hasil perbandingan satu akun dalam *financial report* dengan akun lainnya yang saling terkait (Harahap, 2010:297). Rasio keuangan menjadi komponen penting dalam menganalisa status kondisi *financial report* karena dapat mendeskripsikan aktivitas yang telah dilakukan perusahaan (Fahmi, 2015:107).

Rasio keuangan terdiri dari beberapa macam jenis, dimana masing-masing rasio tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengestimasi kinerja perusahaan dan memberikan arti tentang posisi laporan keuangan perusahaan yang diinginkan (Kasmir, 2015:110). Berikut merupakan jenis rasio keuangan menurut Kasmir (2015:110-116) :

1. “Rasio Likuiditas
Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan.
2. Rasio Solvabilitas
Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva atau ekuitas perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dengan aktiva atau ekuitasnya
3. Rasio Aktivitas
Rasio yang sering digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan.
4. Rasio Profitabilitas
Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.
5. Rasio Pertumbuhan
Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.
6. Rasio Penilaian
Rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya diatas biaya investasi.”

Rasio *Leverage* atau rasio utang merupakan rasio keuangan yang memvisualkan hubungan antara hutang yang dimiliki suatu entitas terhadap ekuitas maupun aktiva yang juga dimiliki entitas tersebut (Fitra, 2019:134). Utang merupakan sumber pendanaan perusahaan yang bersumber dari pihak eksternal perusahaan, sedangkan ekuitas merupakan dana perusahaan yang bersumber dari internal perusahaan itu sendiri (Fitra, 2019:135). *Leverage* atau rasio utang menggambarkan seberapa banyak aktiva atau ekuitas suatu entitas digunakan

untuk menanggung utang entitas tersebut. Fitra (2019:134-136) menyebutkan bahwa, rasio utang atau *leverage* terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. *“Debt To Asset Ratio (DAR)*
Rasio ini merupakan perbandingan antara utang lancar dan utang jangka panjang (total utang) terhadap jumlah seluruh aktiva. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak bagian dari keseluruhan aktiva yang dimiliki suatu entitas yang dibelanjakan melalui utang. Semakin kecil nilai DAR, menggambarkan sumber pendanaan dari utang juga semakin kecil dan sumber pendanaan dari ekuitas semakin besar.
2. *Debt To Equity Ratio (DER)*
Rasio ekuitas terhadap modal merupakan perbandingan antara utang lancar dan utang jangka panjang (total utang) terhadap jumlah keseluruhan modal entitas. Rasio DER menggambarkan mana yang lebih besar antara sumber pendanaan dari utang atau sumber pendanaan dari ekuitas. Semakin kecil nilai DER, maka ketergantungan terhadap total utang semakin berkurang karena memiliki jumlah ekuitas yang lebih besar dibandingkan jumlah utang.
3. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER)*
Rasio ini menggambarkan perbandingan antara utang jangka panjang dengan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas untuk menunjukkan kemampuan ekuitas untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Semakin kecil nilai LTDER, maka ketergantungan terhadap total utang jangka panjang makin berkurang karena memiliki jumlah ekuitas yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah utang jangka panjangnya”.

Martono dan Harjito (2010) menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis *leverage*, yaitu *leverage* operasional (*operating leverage*) dan *leverage* finansial (*financial leverage*). Syamsyuddin (2007:107) menyebutkan bahwa, *operating leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan *operational fixed cost* untuk memperbesar keuntungan yang dapat diperoleh sebelum beban pajak dan bunga yang diperoleh perusahaan. *Financial leverage* merupakan gambaran kemampuan entitas perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban yang dimiliki oleh entitas perusahaan dengan menggunakan beberapa bagian modal entitas. *Financial leverage* dapat diprosikan dengan menggunakan persentase

dari jumlah hutang suatu entitas dibandingkan dengan ekuitasnya pada satu periode atau disebut juga *debt equity ratio* (DER).

Leverage ratio ialah rasio yang difungsikan untuk mengestimasi seberapa banyak utang perusahaan membiayai kegiatan perusahaan (Kasmir, 2014:153).

Melalui rasio *leverage* perusahaan dapat mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai aktivitasnya sehingga perusahaan mampu melihat kemampuannya dalam mengoptimalkan utang (Brigham dan Houston, 2010:140).

Fahmi (2015:72) menyebutkan bahwa jenis *leverage ratio* secara umum diantaranya yaitu:

1. *“Debt to Total Assets Ratio (DAR)*

Rasio yang digunakan untuk menggambarkan perbandingan utang dengan aktiva perusahaan, diperoleh dengan membandingkan total utang perusahaan dengan total aktiva perusahaan.

2. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan untuk memperkirakan besarnya jaminan perusahaan yang tersedia untuk kreditor.

3. *Long Term Debt to Equity Ratio*

Rasio ini digunakan untuk memperlihatkan sumber dana pinjaman perusahaan yang bersumber dari utang jangka panjang.

4. *Fixed Charge Coverage*

Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua biaya atau beban tetapnya dengan laba sebelum pajak dan bunga.

5. *Cash Flow Adequacy*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup pengeluaran modal, utang jangka panjang, dan pembayaran dividen untuk setiap tahunnya.

6. *Time Interest Earned*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar atau menutupi beban bunga dimasa yang akan datang.”

Tabel 2.3 Rasio *Leverage*

PENGUKURAN	CARA PERHITUNGAN
<i>Debt to Total Asset Ratio</i>	$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$
<i>Debt to Equity Ratio</i>	$\frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$
<i>Long Term DER</i>	$\frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{(\text{Utang Jangka Panjang} + \text{Ekuitas Pemegang Saham})}$
<i>Fixed Charge Coverage</i>	$\frac{(\text{Laba Usaha} + \text{Beban Bunga})}{(\text{Beban Bunga} + \text{Beban Sewa})}$
<i>Cash Flow Adequacy</i>	$\frac{\text{Arus Kas dari Aktivitas Operasi}}{(\text{Pengeluaran Modal} + \text{Pelunasan Utang} + \text{Pembayaran Dividen})}$
<i>Time Interest Earned</i>	$\frac{\text{Laba bersih sebelum bunga dan pajak}}{\text{Beban Bunga}}$

Sumber : Fahmi (2015)

Tolak ukur *Leverage Ratio* dalam riset studi ini adalah rasio liabilitas terhadap ekuitas atau DER (*Debt to Equity Ratio*). Perbandingan maksimal antara liabilitas dan ekuitas suatu perusahaan yang diperbolehkan dalam perpajakan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.03/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan yang menetapkan besaran perbandingan utang dengan modal suatu perusahaan dibatasi maksimal empat banding satu (4:1). Pembiayaan melalui utang yang dilakukan perusahaan akan menimbulkan biaya bunga saat pelunasannya. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan

bahwa penghasilan kena pajak dapat dikurangi dengan biaya bunga. Oleh karena itu, PMK No.169/PMK.03/2015 meregulasi perbandingan antara utang dan modal tersebut guna membatasi tingkat penggunaan utang yang berlebihan untuk pembiayaan perusahaan dibandingkan pembiayaan dengan modal.

II.3 Hubungan Antar Variabel

II.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari total aktiva. Perusahaan dengan total aktiva yang besar merupakan perusahaan yang memiliki ukuran yang besar pula, sehingga transaksi yang dilakukan perusahaan akan semakin kompleks (Dewi dan Jati, 2014). Teori agensi menyebutkan, agen dikontrak oleh prinsipal untuk mengelola serta mengendalikan sumber daya (Jensen dan Meckling, 1976). Kontrak tersebut tidak terlepas dari konflik kepentingan dimana agen memiliki tujuan yang berbeda dari prinsipal (Jensen Meckling, 1976). Oleh karena itu, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh agen untuk kepentingan agen sendiri yaitu memaksimalkan insentif kinerja agen melalui pemaksimalan laba yang diperoleh (Rahmawati, 2016:2). Salah satu cara agen memaksimalkan laba yang diperoleh adalah dengan meminimalkan beban pajak perusahaan menggunakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh agen yaitu aktiva perusahaan, sehingga agen dapat memanfaatkan aktiva tersebut untuk aktivitas *tax avoidance* dalam rangka memaksimalkan laba (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Berdasarkan kategori perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 perusahaan yang dikelompokkan kedalam kategori perusahaan besar memiliki sumber daya aset dan penjualan yang lebih besar dibandingkan perusahaan berukuran kecil. Ukuran perusahaan yang semakin besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak (Darmawan dan Sukartha, 2014). Banyaknya jumlah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan akan berdampak pada banyaknya biaya pajak yang dapat dikelola oleh agen (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Hasil penelitian terkait ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* memiliki hasil yang berbeda-beda. Hasil studi yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014), serta Puspita dan Febrianti (2017) menyebutkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak hal tersebut disebabkan skala perusahaan didasarkan pada banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar skala sebuah perusahaan maka semakin banyak sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan agen dapat memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mengelola beban pajak. Namun, penelitian yang dilakukan Dewi dan Jati (2014) menunjukkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap dengan *tax avoidance* hal tersebut dikarenakan baik perusahaan dengan skala besar maupun perusahaan berskala kecil sama-sama memiliki kewajiban untuk membayar pajak, apabila melanggar ketentuan perpajakan perusahaan besar ataupun perusahaan kecil akan selalu dikejar oleh fiskus.

II.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Pertumbuhan penjualan merujuk kepada kenaikan penjualan serta jasa perusahaan antara penjualan periode berjalan dengan periode sebelumnya dalam bentuk persentase (Carvalho dan Costa, 2014:91). Penjualan yang bertumbuh akan berdampak pada laba usaha yang akan dihasilkan perusahaan semakin besar. Motivasi wajib pajak meminimalkan beban pajaknya baik secara legal maupun ilegal salah satunya termotivasi oleh besarnya pajak yang dibebankan, semakin besar jumlah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya juga semakin besar (Pohan, 2013:18-19).

Berdasarkan teori keagenan, agen mempunyai kepentingan untuk memperoleh insentif atas kinerjanya yang diukur dari laba perusahaan (Zulma, 2016). Pertumbuhan penjualan yang semakin besar akan menghasilkan laba yang juga semakin besar dan berakibat pembebanan pajak yang semakin besar pula (Puspita dan Febrianti, 2017). Prinsipal memberikan tugas kepada agen untuk mengelola sumber daya yang telah diberikan oleh prinsipal dengan tujuan meningkatkan nilai *shareholder* (Jensen dan Meckling, 1976). *Shareholder* menginginkan pengembalian modal yang sesuai bahkan lebih banyak dari modal yang mereka berikan kepada perusahaan (Masrullah, dkk, 2018). Oleh karena itu, agen untuk mencapai tujuan tersebut berusaha manajemen beban pajak yang akan timbul dari pertumbuhan penjualan tersebut agar pajak yang timbul tidak terlalu banyak mengurangi laba yang diperoleh perusahaan dan dapat

meningkatkan pengembalian modal kepada *shareholder* sekaligus meningkatkan insentif kinerja yang dapat agen peroleh dari prinsipal (Masrullah, dkk, 2018).

Pertumbuhan penjualan perusahaan yang mengalami perubahan nilai maka besar kemungkinan laba yang diperoleh perusahaan juga akan mengalami perubahan (Puspita dan Febrianti, 2017). Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan juga akan mengalami peningkatan yang otomatis akan berdampak pada beban pajak yang juga akan semakin meningkat (Marini, dkk, 2019). Pohan (2013:18-19) menyebutkan motivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak baik secara legal maupun ilegal salah satunya adalah besarnya beban pajak yang dibayarkan, makin besar jumlah pajak yang harus dibayar akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

Hasil penelitian terkait pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* memiliki hasil yang berbeda-beda. Hasil studi yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2017), Masrullah, dkk (2018) menunjukkan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* hal tersebut disebabkan apabila pertumbuhan penjualan perusahaan semakin besar, maka laba yang dihasilkan juga akan meningkat sehingga agen akan berusaha mengelola beban pajak agar tidak mengurangi insentif kinerja agen. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Marini, dkk (2019) menyebutkan pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

II.3.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage ialah rasio yang memberikan gambaran mengenai hubungan antara liabilitas terhadap ekuitas ataupun aktiva yang dimiliki oleh suatu entitas (Fitra, 2019:134). Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aset atau ekuitasnya. Berdasarkan teori *trade off*, perusahaan bisa mengorbankan manfaat suatu aspek untuk mendapatkan manfaat lebih pada aspek yang lain (Aisyah, 2012:6). Teori *trade off* menjelaskan bahwa perusahaan yang membayar pajak dengan jumlah besar sebaiknya lebih banyak menggunakan utang dibandingkan dengan perusahaan yang membayar pajak rendah (Aisyah, 2012:18). Perusahaan dengan jumlah beban pajak yang besar dapat mengorbankan biaya kebangkrutan menjadi lebih tinggi untuk memperoleh manfaat berupa pengurangan pajak (Brigham dan Daves, 2004). Hal tersebut disebabkan aliran kas dari utang dan ekuitas dikenakan pajak yang berbeda oleh pemerintah, karena biaya bunga dapat mengurangi pembayaran pajak sedangkan deviden tidak, bunga yang dibayarkan dapat dijadikan sebagai beban pengurang pajak menyebabkan pendanaan dari utang menjadi lebih murah dibandingkan pendanaan dari modal (Azazi, 2008).

Keputusan pendanaan perusahaan bisa memberikan gambaran mengenai penghindaran pajak terkait dengan *effective tax ratio*, hal tersebut disebabkan terdapat peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997 dalam Darmawan dan Sukartha, 2014). Menurut Fitra (2019:135) melalui rasio *leverage* dapat tergambarkan keputusan pendanaan perusahaan apakah lebih banyak menggunakan pendanaan eksternal (utang) atau

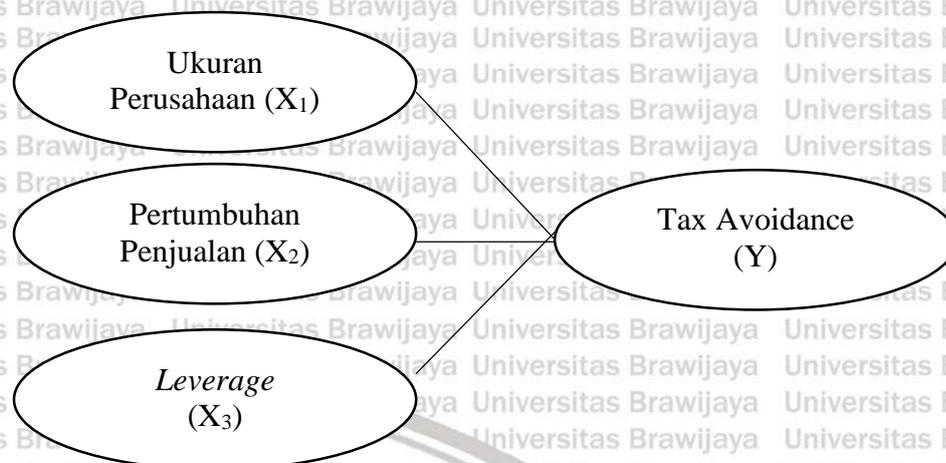
pendanaan internal (ekuitas). Salah satu rasio *leverage* yaitu DER menggambarkan mana yang lebih besar antara sumber pendanaan dari utang atau sumber pendanaan dari ekuitas, semakin tinggi nilai rasio DER berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari pihak eksternal (utang) yang digunakan perusahaan (Fitra, 2019:136). Semakin tinggi jumlah pendanaan dari pihak eksternal (utang) maka semakin tinggi juga beban bunga yang akan timbul atas utang tersebut.

Agen dapat memanfaatkan aliran kas dari utang tersebut dalam rangka meminimalkan beban pajak karena aliran kas dari utang akan menimbulkan beban bunga yang ditanggung perusahaan dan dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dalam rangka menguntungkan pribadi agen (Azazi, 2008).

Hasil penelitian terkait *leverage* terhadap *tax avoidance* memiliki hasil yang berbeda-beda. Hasil studi yang dilakukan oleh Masrullah, dkk (2018) menunjukkan *leverage* memiliki pengaruh dengan *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan Darmawan dan Sukartha (2016), Puspita dan Febrianti (2017) menunjukkan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

II.4 Model Konseptual

Model konsep yang digunakan penulis didasarkan kepada pengaruh parsial tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen yang dikaitkan dengan teori dan pustaka yang digunakan dan telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti, berikut merupakan modal konsep studi riset ini :



Gambar 2.1 Model Konsep

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti

II.5 Model Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka hubungan antar variabel, diketahui ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* mempengaruhi *tax avoidance*.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis penelitian ini, yaitu :

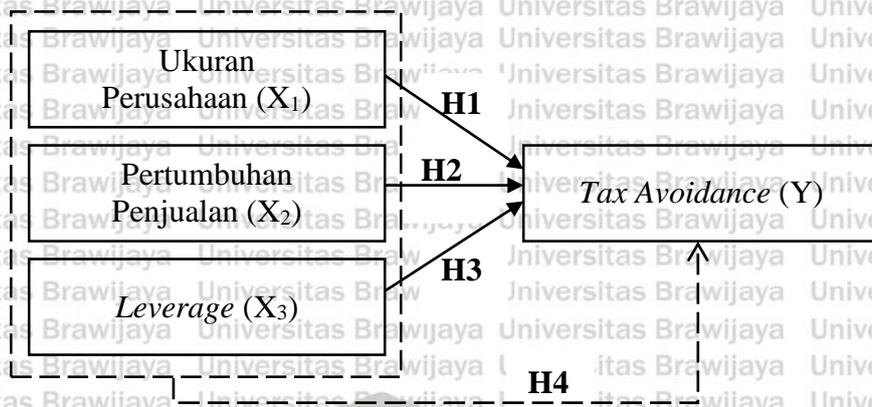
H₁ : Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H₂ : Diduga pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H₃ : Diduga *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H₄ : Diduga ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage*

berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*



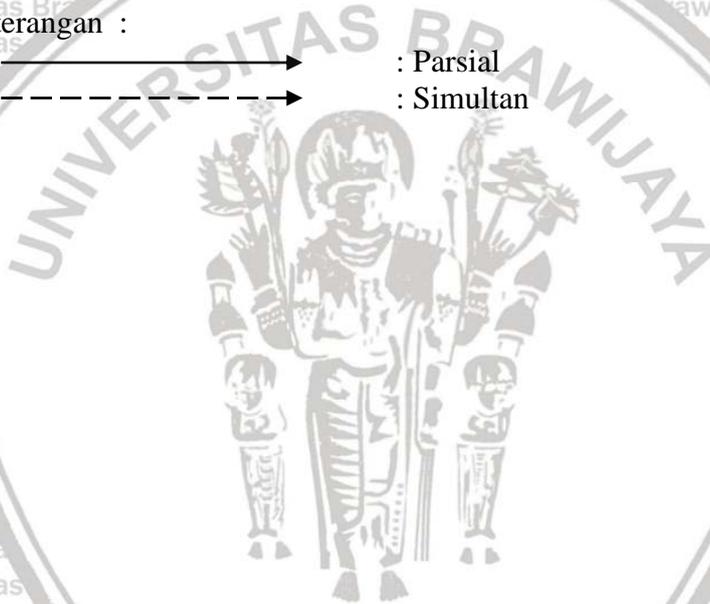
Gambar 2.2 Model Hipotesis

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti

Keterangan :

→ : Parsial

- - - : Simultan



BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Jenis Penelitian

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam riset studi ini, penelitian kuantitatif dilakukan berdasarkan data yang berupa angka-angka dan alat bantu statistik digunakan untuk melakukan analisis. Penelitian kuantitatif cenderung dituntut memanfaatkan angka, sejak dari pengumpulan data, penafsiran data, hingga penampilan hasil penelitiannya (Arikunto, 2002 dalam Anshori 2017:14).

Sugiyono (2016:13) menyatakan bahwa pendekatan yang paling cocok digunakan dalam meneliti populasi atau sampel tertentu adalah pendekatan kuantitatif, selain itu pendekatan kuantitatif juga cocok digunakan pada penelitian dengan tujuan untuk pembuktian konfirmasi. Menguji hipotesis yang telah ditetapkan peneliti merupakan tujuan dari penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2016:13).

Desain riset studi ini memanfaatkan format penelitian eksplanasi (*explanatory research*). Penelitian eksplanasi (*explanatory research*) yaitu penelitian dengan tujuan dalam rangka menggeneralisasi sampel terhadap populasi atau menjelaskan hubungan, perbedaan, atau pengaruh antara suatu variabel dengan variabel lainnya (Bungin, 2017:46). Ditinjau dari tingkat eksplanasinya, penelitian ini termasuk kedalam lingkup *associative research*.

Associative Research dilakukan untuk memperjelas hubungan antara dua variabel atau lebih (Anshori, 2017:13). Penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan

antara variabel ukuran perusahaan (X_1), pertumbuhan penjualan (X_2), dan leverage (X_3) terhadap *Tax Avoidance* (Y).

III.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data sekunder penelitian ini merupakan laporan keuangan yang telah diaudit semua perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2019. Data laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel karena data panel merupakan data yang memiliki karakteristik gabungan dari data *time series* dan data *cross section*, dimana data dikumpulkan menurut interval waktu tertentu yaitu tahun 2017-2019 dan terdiri dari lebih dari satu objek. Data laporan keuangan tersebut bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu <https://www.idx.co.id/>. Peneliti menjadikan laman BEI sebagai lokasi penelitian karena laman situs tersebut menyediakan akses bagi publik untuk memperoleh laporan keuangan dan data perusahaan yang telah tercatat di BEI salah satunya perusahaan sektor manufaktur.

III.3 Lokasi Penelitian

Nasution (2003:43) mendefinisikan lokasi penelitian sebagai letak atau tempat penelitian dilaksanakan, lokasi penelitian dicirikan dengan adanya elemen partisipan, lokasi, dan kegiatan yang dapat diobservasi. Studi riset ini menggunakan BEI melalui laman situs www.idx.co.id sebagai lokasi penelitian.

Perusahaan sektor manufaktur sub sektor *consumer goods industry* yang terdaftar di BEI periode tahun 2017 hingga 2019 adalah ruang lingkup penelitian yang

dipilih oleh peneliti dengan alasan perusahaan sub sektor *consumer goods industry* merupakan sektor yang berkaitan dengan kebutuhan manusia sehari-hari, sehingga berpotensi menghasilkan penjualan yang besar dan menyebabkan pembayaran pajak juga besar. Hal tersebut menjanjikan serta menarik minat investor untuk berinvestasi, yang didukung dengan pernyataan Badan Koordinasi Pengelolaan Modal yang menyebutkan selama tahun 2015 hingga tahun 2020 sub sektor *consumer goods industry* merupakan sektor yang paling diminati oleh investor (okezone.com, 2020). Sementara alasan peneliti memilih untuk memulai penelitian tahun 2017-2019 adalah karena pada tahun 2017 pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor manufaktur mulai mengalami penurunan. Pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2017 sebesar 17,1%, namun setelah tahun 2017 persentase pertumbuhan penerimaan pajak pada sektor manufaktur terus menurun. Data APBN tahun 2018 menunjukkan penerimaan pajak sektor manufaktur bertumbuh sebesar 12,74%, persentase pertumbuhan penerimaan pajak tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2017 sebelumnya. Hingga pada akhir tahun 2019, persentase pertumbuhan penerimaan pajak yang tercatat pada APBN kembali menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya hingga ke tahap negatif atau terjadi penurunan penerimaan pajak yaitu sebesar -3,1%.

III.4 Variabel dan Pengukuran

III.4.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan dipelajari sehingga peneliti memperoleh informasi tentang yang diteliti, untuk selanjutnya dipetik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:2). Variabel

didefinisikan oleh Hatch dan Farhady (1981) dalam Sugiyono (2017:3) sebagai seseorang atau objek yang memiliki variasi antara suatu orang dengan orang lainnya atau suatu objek dengan objek lainnya. Variabel penelitian ini adalah :

1) Variabel Independen

Sugiyono (2017:4) mendefinisikan variabel independen sebagai variabel yang dapat menjadi pengaruh atau dapat menjadi penyebab perubahan. Variabel independen juga dikenal sebagai variabel eksogen dalam permodelan persamaan struktural. Ukuran perusahaan (X_1), pertumbuhan penjualan (X_2), dan *leverage* (X_3) merupakan variabel independen pada riset studi ini

2) Variabel Dependen

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang terpengaruh oleh variabel independen atau variabel yang menjadi akibat (Sugiyono, 2017:4).

Variabel dependen dikenal juga dengan nama variabel endogen dalam permodelan persamaan struktural. *Tax Avoidance* (Y) adalah variabel endogen yang terdapat pada riset studi ini.

III.4.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional menggambarkan sebuah pengukuran suatu konsep dengan melihat melalui suatu indikator tertentu (Noor, 2011:97). Masing-masing variabel yang digunakan pada riset studi ini memiliki definisi sebagai berikut :

1. Ukuran Perusahaan

Riset studi ini menggunakan definisi ukuran perusahaan yang dinyatakan oleh Hasibuan (2009) dalam Sari, Kalbuana, dan Jumadi (2016:433) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah pengklasifikasian skala usaha melalui beragam

repository.ub.ac.id

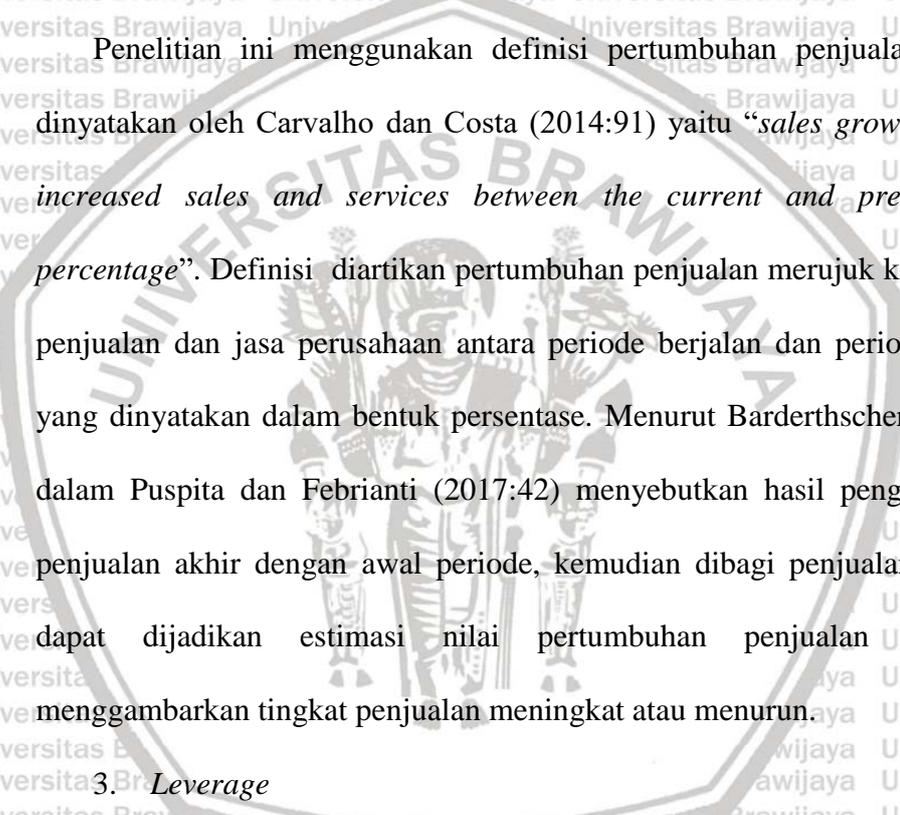
cara diantaranya jumlah aktiva, *log size*, jumlah penjualan, dan lainnya. Estimasi nilai ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset karena dinilai bahwa ukuran tersebut memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode (Darmawan dan Sukartha, 2014).

2. Pertumbuhan Penjualan

Penelitian ini menggunakan definisi pertumbuhan penjualan sesuai yang dinyatakan oleh Carvalho dan Costa (2014:91) yaitu “*sales growth refers to the increased sales and services between the current and previous year in percentage*”. Definisi diartikan pertumbuhan penjualan merujuk kepada kenaikan penjualan dan jasa perusahaan antara periode berjalan dan periode sebelumnya yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Menurut Barderthscher *et. al.*, (2009) dalam Puspita dan Febrianti (2017:42) menyebutkan hasil pengurangan antara penjualan akhir dengan awal periode, kemudian dibagi penjualan awal periode dapat dijadikan estimasi nilai pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan tingkat penjualan meningkat atau menurun.

3. *Leverage*

Penelitian ini menggunakan definisi *leverage* yang dinyatakan oleh Fitra (2019:134), *leverage* atau rasio utang merupakan rasio yang memberikan gambaran mengenai hubungan antara utang suatu entitas terhadap ekuitas maupun aktiva yang dimiliki oleh entitas tersebut. *Leverage* dapat diukur dengan banyak cara diantaranya adalah *Debt Equity Ratio* (DER) yang digunakan peneliti untuk mengestimasi rasio utang atau *leverage* perusahaan karena dapat menggambarkan



seberapa besar ekuitas perusahaan dibiayai dengan total utang (Masrullah, dkk, 2018).

4. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Penghindaran pajak didefinisikan Pohan (2013:23) sebagai sebuah upaya menekan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak secara legal dan sah karena masih berada dalam ruang lingkup ketentuan perpajakan, karena cenderung hanya dilakukan melalui pemanfaatan *loopholes* yang terkandung dalam regulasi perpajakan. *Cash ETR* dipilih sebagai cara mengestimasi *tax avoidance* karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak (Dyrenng, dkk, 2010 dalam Puspita dan Febrianti, 2017).

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran
Ukuran Perusahaan (X ₁)	Total Aktiva	Ln (Total Aktiva)
Pertumbuhan Penjualan (X ₂)	Penjualan	$\frac{\text{Penjualan Akhir Periode} - \text{Penjualan Awal Periode}}{\text{Penjualan Awal Periode}}$
Leverage (X ₃)	<i>Debt To Equity Ratio</i>	$\frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	<i>Cash Effective Tax Ratio</i>	$\frac{\text{Pajak yang dibayarkan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2020

III.5 Populasi dan Sampel

III.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016:135), populasi adalah objek atau subjek yang memiliki kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti lebih lanjut

dan ditarik kesimpulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti apakah ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods industry* di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Sehingga populasi dalam riset studi ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods industry* yang terdaftar di BEI periode 2017 hingga 2019. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang terlebih dahulu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, baru kemudian dijual kepada para pelanggan (Hery, 2015:1-2).

Contoh perusahaan manufaktur adalah perusahaan rokok, perusahaan pembuat obat, perusahaan pembuat sepatu, perusahaan pembuat makanan dan minuman.

III.5.2 Sampel

Sugiyono (2016:136) memaparkan bahwa bagian dari jumlah dan kualifikasi tertentu suatu populasi penelitian merupakan definisi dari sampel. *Purposive sampling* digunakan peneliti dalam menentukan sampel penelitian ini. *Purposive sampling* sendiri merupakan suatu cara dalam menentukan sampel melalui beberapa kriteria yang dipilih oleh peneliti (Sugiyono, 2017:67). Alasan peneliti menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memenuhi kriteria yang sesuai dengan yang telah ditetapkan peneliti (Lazuardini, dkk, 2018).

Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk mendapatkan sampel yang representatif. Penelitian ini menetapkan kriteria sampel sebagai berikut :

1. Perusahaan merupakan perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-

2019, karena subjek penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019;

2. Perusahaan secara rutin mempublikasikan *financial report* per 31 Desember periode 2017-2019, karena data variabel-variabel penelitian ini dapat diperoleh dari *financial report* yang dipublikasikan;
3. Perusahaan tidak mengalami kerugian dalam *financial report* selama periode 2017-2019, karena agar tidak menimbulkan distorsi dalam pengukuran penghindaran pajak (Darmawan dan Sukartha, 2014).
4. Memiliki data yang berkaitan dengan variabel penelitian, karena data tersebut digunakan untuk diolah dan dianalisis.

Peneliti sebelum menentukan sampel perusahaan yang akan diteliti mempertimbangkan beberapa kriteria. Adapun prosedur pemilihan sampel yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI	61
2	Perusahaan tidak rutin menerbitkan laporan keuangan tahunan dalam periode 2017-2019 dan data tidak lengkap	(19)
3	Perusahaan mengalami kerugian dalam laporan keuangan dalam periode 2017-2019	(11)
4	Perusahaan yang dijadikan sampel	31
5	Jumlah observasi (31 perusahaan x 3 tahun)	93

Sumber : Data diolah peneliti, 2020

Berlandaskan tabel diatas, terdapat 61 perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi selama periode 2017-2019, terdapat 19 perusahaan dari

populasi yang tidak rutin menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode 2017-2019, dan 11 perusahaan mengalami kerugian operasional selama periode 2017-2019. Oleh karena itu, sampel riset studi ini adalah sejumlah 31 sampel perusahaan selama tiga tahun dari tahun 2017-2019. Rincian nama perusahaan yang menjadi sampel dalam riset studi ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Daftar Perusahaan Sampel

Nomor	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk.
2	CAMP	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk.
3	CEKA	PT. Wilmay Cahaya Indonesia Tbk.
4	CINT	PT. Chitose Internasional Tbk.
5	CLEO	PT. Sariguna Primatirta Tbk.
6	DLTA	PT. Delta Jakarta Tbk.
7	DVLA	PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk.
8	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk.
9	HMSP	PT. H.M Sampoerna Tbk.
10	HOKI	PT. Buyung Poetra Sembada Tbk.
11	HRTA	PT. Hartadinata Abadi Tbk.
12	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
13	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.
14	KAEF	PT. Kimia Farma Tbk.
15	KINO	PT. Kino Indonesia Tbk.
16	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk.
17	MERK	PT. Merck Tbk.
18	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk.
19	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk.
20	PYFA	PT. Pyridam Farma Tbk.
21	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.
22	SIDO	PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
23	SKLT	PT. Sekar Laut Tbk.
24	STTP	PT. Siantar Top Tbk.
25	TBLA	PT. Tunas Baru Lampung Tbk.
26	TCID	PT. Mandom Indonesia Tbk.
27	TSPC	PT. Tempo Scan Pacific Tbk.
28	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk.
29	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk.
30	WIIM	PT. Wismilak Inti Makmur Tbk.
31	WOOD	PT. Integra Indocabinet Tbk.

Sumber : Data diolah peneliti, 2020

III.6 Metode Pengumpulan Data

Data sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode dokumentasi dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods industry* periode 2017-2019 yang dipublikasikan di laman BEI atau www.idx.co.id. Disamping itu, penelitian ini juga memanfaatkan data dari referensi lain seperti buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan terkait.

III.7 Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis kuantitatif adalah metode analisis data yang dimanfaatkan pada penelitian ini dengan memanfaatkan *software* SPSS sebagai alat bantu analisis. Data yang diperoleh akan terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Metode yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan penyajian data hingga menghasilkan informasi yang berguna disebut dengan analisis statistik deskriptif (Ghodang dan Hantono, 2020:31). Statistik deskriptif menampilkan ringkasan data penelitian seperti *mean*, minimum, maksimum, standar deviasi, varian, modus, dan lain-lain (Ghodang dan Hantono, 2020:32). Tujuan dari analisis statistika deskriptif pada penelitian ini yaitu meringkas data dan memberikan rincian tentang minimum, maximum, *mean*, dan standar deviasi data.

2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi dapat digunakan sebagai prediksi jika telah memenuhi asumsi yang dikenal asumsi klasik (Santoso, 2010:203). Uji asumsi klasik dilakukan

untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten (Gunawan, 2018)

1) Uji Normalitas

Normality test diselenggarakan dalam rangka mengetahui apakah keseluruhan populasi data riset terdistribusi normal atau tidak (Ghodang dan Hantono, 2020:32). Uji ini dimanfaatkan untuk mengetahui ukuran data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Data yang baik harus mempunyai distribusi yang normal apabila analisis data menggunakan metode parametrik (Ghodang dan Hantono, 2020:32). Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam riset studi ini dalam rangka menguji data terdistribusi normal atau tidak. Ghodang dan Hantono (2020:45) menjelaskan bahwa dalam uji Kolmogorov-Smirnov keputusan diambil dengan dasar sebagai berikut :

- a. Jika hasil uji menunjukkan nilai Sig. (signifikansi) lebih besar dari ($>$) 0.05, maka data penelitian terdistribusi dengan normal.
- b. Jika hasil uji menunjukkan nilai Sig. (signifikansi) lebih kecil dari ($<$) 0,05, maka data penelitian terdistribusi tidak normal.

2) Uji Multikolinieritas

Salah satu asumsi utama dalam permodelan regresi ialah multikolinieritas, yaitu diantara variabel bebas tidak boleh terjadi korelasi yang kuat dan signifikan antara variabel satu dengan variabel lainnya (Santoso, 2010:203). Ghodang dan Hantono (2020:47) menyatakan bahwa uji multikolinieritas dilaksanakan guna melihat hubungan antarvariabel independen suatu penelitian. Penelitian ini membandingkan angka *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)

sebagai pengujian multikolinieritas. Keputusan pada uji multikolinieritas menggunakan nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) disimpulkan dengan dasar keputusan :

- a. Apabila hasil uji menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari ($>$) 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih kecil dari ($<$) 10, maka tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel bebas.
- b. Apabila hasil uji menunjukkan nilai *tolerance* lebih kecil dari ($<$) 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih besar atau sama dengan (\geq) 10, maka terdapat gejala multikolinieritas antar variabel bebas.

3) Uji Autokorelasi

Asumsi klasik yang utama dalam permodelan regresi adalah autokorelasi, yaitu apakah terjadi gangguan terhadap data yang bersifat *time series* (Santoso, 2010:203). Model regresi yang baik tidak mengalami gangguan terhadap data.

Tujuan diselenggarakan uji autokorelasi ialah untuk menguji apakah model regresi linear saling berkorelasi antara observasi periode berjalan dengan observasi periode sebelumnya (Ghodang dan Hantono, 2020:50). Uji Durbin-

Watson digunakan dalam riset studi ini sebagai uji autokorelasinya, uji Durbin-

Watson memperhatikan nilai Durbin-Watson (d). Menurut Ghodang dan Hantono (2020:50), dasar pengambilan keputusan yang dipakai dalam rangka menemukan ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut :

H_0 : tidak terdapat autokorelasi

- a. Jika hasil uji menunjukkan $0 < d < dL$ atau $4-dL < d < 4$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak atau terdapat autokorelasi

- b. Jika hasil uji menunjukkan $dU < d < 4-dU$, maka hipotesis nol (H_0) diterima yang berarti tidak terdapat autokorelasi
- c. Jika hasil uji menunjukkan $dL < d < dU$ atau $4-dU < d < 4-dL$, maka uji tersebut tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti

a. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan dalam rangka menilai apakah terdapat ketidaksamaan variasi dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear (Ghodang dan Hantono, 2020:55).

Penelitian dengan model regresi yang baik seharusnya memiliki variasi disekitar garis regresi yang konstan atau tetap untuk setiap nilai variabel bebas atau homoskedastisitas (Santoso, 2010:203). Uji Spearman's Rho digunakan dalam penelitian ini sebagai metode uji heteroskedastisitas. Uji Spearman's Rho melihat signifikansi nilai antara masing-masing variabel independen dengan residualnya (Priyatno, 2014:108). Menurut Ghodang dan Hantono (2020:72), keputusan dalam uji Spearman diambil menggunakan dasar sebagai berikut :

- a. Apabila hasil uji menunjukkan p -value atau signifikansi lebih besar dari ($>$) 0.05, maka data tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.
- b. Apabila hasil uji menunjukkan p -value atau signifikansi lebih kecil dari ($<$) 0.05, maka data mengalami gejala heteroskedastisitas.

3. Model Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda dimanfaatkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh atau hubungan yang linier antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat (Priyatno, 2014:148). Regresi linier berganda merupakan

model regresi linier yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas (Ghodang dan Hantono, 2020:90). Regresi linear berganda diselenggarakan dalam penelitian ini karena variabel bebas pada penelitian ini berjumlah lebih dari satu yaitu ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage*. Sedangkan variabel terikat pada riset studi ini hanya berjumlah satu yaitu *tax avoidance* yang diproksikan melalui *Cash Effective Tax Ratio (Cash ETR)*. Regresi linier berganda dalam riset studi ini menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan :

- Y : Nilai prediksi variabel dependen (*Cash ETR*)
- α : Konstanta, yaitu nilai Y jika nilai X_1 dan X_2 adalah 0
- X_1 : Variabel independen 1 (ukuran perusahaan)
- X_2 : Variabel independen 2 (pertumbuhan penjualan)
- X_3 : Variabel independen 3 (*leverage*)
- β_1 : Koefisien regresi ukuran perusahaan
- β_2 : Koefisien regresi pertumbuhan penjualan
- β_3 : Koefisien regresi *leverage*

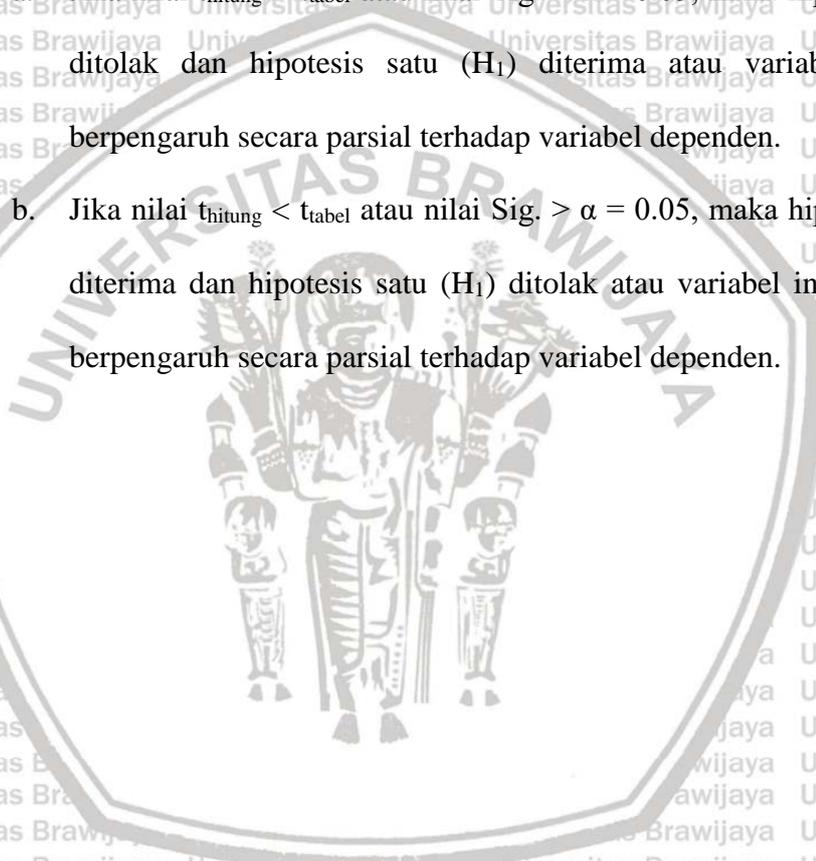
4. Uji Hipotesis

1) Uji Statistik T

Tujuan uji statistik T yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh parsial antara setiap variabel bebas dengan variabel terikat suatu penelitian (Ghodang dan Hantono, 2020:77). Penelitian ini menguji pengaruh parsial

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara memkomparasikan besaran nilai t-hitung dengan nilai t-tabel atau dengan memperhatikan nilai Sig (Signifikansi). Ghodang dan Hantono (2020:77), menyatakan keputusan atas hasil uji statistik t diambil dengan menggunakan dasar sebagai berikut :

- a. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai Sig. $< \alpha = 0.05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis satu (H_1) diterima atau variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai Sig. $> \alpha = 0.05$, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis satu (H_1) ditolak atau variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.



2) Uji Statistik F

Uji statistik F dilaksanakan agar dapat melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat suatu penelitian (Ghodang dan Hantono, 2020:81). Riset studi ini menguji pengaruh simultan variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat dengan mengkomparasikan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} atau dengan memperhatikan nilai signifikansi. Ghodang dan Hantono (2020:81), menyatakan bahwa pengambilan keputusan didasarkan atas hasil uji F adalah sebagai berikut :

- a. Jika hasil uji menunjukkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai $Sig. < \alpha = 0.05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis satu (H_1) diterima atau variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen
- b. Jika hasil uji menunjukkan nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai $Sig. > \alpha = 0.05$, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis satu (H_1) ditolak atau variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan dalam mengukur tingkat peran serta pengaruh variabel bebas kepada variabel terikat yang disajikan dalam bentuk persentase (Priyatno, 2014:156). Penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi dalam rangka mengetahui seberapa besar variabel bebas yaitu ukuran perusahaan (X_1), pertumbuhan penjualan (X_2), dan *leverage* (X_3) memiliki pengaruh terhadap variabel terikat yaitu *tax avoidance* (Y).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1 Gambaran Umum Perusahaan Sampel

Objek riset studi ini merupakan perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods industry* yang tercatat di BEI selama periode tahun 2017-2019. Sampel perusahaan yang diteliti dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Sebanyak 31 perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods industry* dengan total data laporan keuangan sebanyak 93 laporan keuangan terpilih sebagai sampel pada penelitian ini setelah dilangsungkan seleksi pemilihan sampel sesuai standar yang telah ditetapkan oleh peneliti. Berikut merupakan gambaran umum tiap-tiap perusahaan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini :

1. PT. Budi Starch & Sweetener Tbk

Perseroan berdiri pada tahun 1979 dengan nama PT. Budi Acid Jaya dan bergerak dibidang industri pengolahan bahan makanan dan bahan kimia. Pada tahun 1995, PT. Budi Acid Jaya mencatatkan secara perdana saham-sahamnya kepada publik. Seiring dengan globalisasi produk secara universal, maka nama perseroan berubah menjadi PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Saat ini perseroan bergerak dalam pengolahan dan penjualan tepung tapioka, *sweeteners*, karung plastik, asam sulfat, dan bahan kimia lainnya. Saat ini perseroan berada dibawah naungan Sungai Budi Grup (SBG) dan saham perseroan saat ini diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten BUDI.

2. PT. Campina Ice Cream Industry Tbk

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang pertama kali didirikan pada tahun 1972 dalam bentuk Firma bernama CV Pranoto dengan merk dagang Campina. Seiring berjalannya waktu CV Pranoto merubah status perusahaan dari firma menjadi perseroan terbatas dengan nama PT. Campina Ice Cream Industry.

Perseroan bergerak dalam bidang usaha industri pengolahan dan perdagangan yaitu industri pengolahan es krim dan industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok). Perseroan memiliki kantor pusat di Surabaya, Jawa Timur. Saham perseroan masih diperdagangkan hingga saat ini sejak penawaran umum perdana tanggal 19 Desember 2017 di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten CAMP.

3. PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang pada awalnya didirikan dalam bentuk firma pada tahun 1968 di Pontianak dengan nama CV Tjahaja Kalbar. Saat ini PT. Wilmar Cahaya Indonesia memiliki kantor pusat yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. perseroan bergerak dibidang industri pengolahan diantara lain pengolahan minyak nabati. Pada tahun 1996, perseroan melakukan penawaran umum saham perdana dan sahamnya diperdagangkan hingga saat ini di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten CEKA.

4. PT. Chitose Internasional Tbk

Perseroan pertama kali didirikan pada tanggal 15 Juni 1998 dengan nama PT. Chitose Indonesia Manufacturing. PT. Chitose Internasional Tbk memiliki kantor pusat yang terletak di Cimahi, Jawa Barat. PT. Chitose Internasional Tbk bergerak dalam bidang pengolahan, perdagangan, dan jasa dengan kegiatan usaha yang

utama pada bidang industri furnitur dan perdagangan. PT Chitose Internasional resmi melakukan penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 dengan kode emiten CINT.

5. PT. Sariguna Primatirta Tbk

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan sejak tahun 1988 dan bernaung dibawah kelompok usaha Tanobel Food yang memproduksi makanan dan minuman seperti air minum dalam kemasan, biskuit, dan minuman serbuk.

Kegiatan utama dari PT. Sariguna Primatirta Tbk sendiri adalah sebagai produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Saat ini perseroan memiliki kantor pusat di Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Saham dari PT. Sariguna Primatirta Tbk tercatat diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia sejak 5 Mei 2017 dengan kode emiten CLEO.

6. PT. Delta Djakarta Tbk

Perseroan didirikan pertama kali di Indonesia pada tahun 1932 sebagai perusahaan produksi bir Jerman. Perusahaan baru resmi menggunakan nama PT. Delta Djakarta mulai tahun 1970. Perseroan sendiri bergerak dalam bidang usaha pengolahan dan ekspor bir pilsener dengan merek dagang Batavia. Saat ini perseroan memiliki kantor pusat yang terletak di Bekasi, Jawa Barat. Saham dari PT. Delta Djakarta Tbk mulai tercatat diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1984 dengan kode emiten DLTA.

7. PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk

Perseroan adalah perusahaan industri farmasi yang telah berdiri sejak tahun 1976. Perseroan bergerak dibidang pengolahan produk-produk farmasi seperti

kapsul gelatin lunak, plester obat, salep, dan krim. Beberapa produk dari PT.

Darya-Varia Laboratoria Tbk antara lain enervon-c, decolgen, dan natur-e. Saat ini perseroan memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jakarta. Saham PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk pertama kali diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia pada bulan November tahun 1994 dengan kode emiten DVLA.

8. PT. Gudang Garam Tbk

Perseroan ialah perusahaan produsen rokok kretek yang pertama kali didirikan pada tahun 1958 di Kediri, Jawa Timur. Perseroan bergerak dalam industri pengolahan tembakau serta berbagai jenis rokok kretek serta produk tradisional sigaret kretek tangan. Perseroan memiliki fasilitas produksi di Kediri dan Gempol, Jawa Timur. PT. Gudang Garam Tbk pertama kali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1990 dengan kode emiten GGRM.

9. PT. H.M Sampoerna Tbk

Perseroan merupakan perusahaan produsen rokok kretek yang pada awalnya didirikan dengan nama Sampoerna oleh seorang imigran asal Tiongkok pada tahun 1930 di Surabaya. Sampoerna baru resmi menjadi perseroan terbatas pada tahun 1963. PT. H.M Sampoerna Tbk bergerak dalam bidang pengolahan dan perdagangan serta usaha dibidang industri produk tembakau lainnya. Saat ini PT.

H.M Sampoerna memiliki *head office* yang terletak di Surabaya, Jawa Timur.

Saham PT. H.M Sampoerna Tbk pertama kali diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1990 dengan kode emiten HMSP.

10. PT. Buyung Poetra Sembada Tbk

PT. Buyung Poetra Sembada Tbk adalah perseroan yang bergerak di industri pengolahan dan distribusi beras premium di Indonesia. PT. Buyung Poetra Sembada Tbk memproduksi dan melakukan perdagangan beras dengan merek utama HOKI dan Topi Koki. Pertama kali perseroan didirikan pada tanggal 16 September 2003. Saat ini PT. Buyung Poetra Sembada memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jakarta. Saham PT. Buyung Poetra Sembada terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2017 dan masih diperdagangkan hingga saat ini dengan kode emiten HOKI.

11. PT. Hardinata Abadi Tbk

Perseroan pertama kali berdiri pada tahun 2004 di Kabupaten Bandung. PT. Hardinata Abadi Tbk bergerak dalam usaha pengolahan dan perdagangan perhiasan emas dan logam mulia. Saat ini PT. Hardinata Abadi Tbk memiliki kantor pusat yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. PT. Hardinata Abadi Tbk resmi menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 lalu. Saham PT. Hardinata Abadi Tbk diperjualbelikan di BEI dengan kode emiten HRTA.

12. PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Perseroan secara perdana berdiri pada tahun 2009. PT. Indofood CBP Sukses Makmur berawal dari grup Produk Konsumen Bermerek (*Consumer Branded Product* atau "CBP") induk perseroan yaitu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.

PT. Indofood Sukses Makmur melakukan restrukturisasi macam-macam kegiatan usaha produk konsumen bermerek dibawah grup CBP dalam rangka pembentukan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebagai entitas terpisah pada tahun 2009.

Kegiatan usaha perseroan adalah pengolahan dan perdagangan produk mi dan bumbu penyedap, makanan ringan, serta minuman non-alkohol. Hingga saat ini saham dari PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk masih diperjualbelikan di BEI sejak tahun 2010 dengan kode emiten ICBP.

13. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk secara perdana berdiri pada tahun 1990 dengan nama PT. Panganjaya Intikusuma. Mulanya PT. Panganjaya Intikusuma memulai kegiatan bisnis di industri makanan ringan melalui usaha patungan dengan *Fritolay Netherlands Holding BV*, afiliasi dari PepsiCo Inc. Perseroan baru menggunakan nama PT. Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1994 sekaligus melakukan penawaran umum saham perdana dalam rangka memperdagangkan sahamnya di BEI. Saat ini saham dari PT. Indofood Sukses Makmur Tbk diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten INDF. Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk meliputi industri pengolahan tepung terigu yang digabungkan dengan kegiatan usaha anak perusahaannya di industri konsumen bermerek, termasuk perkebunan dan kelapa sawit serta pengolahan hasil pertanian lainnya dalam bidang agribisnis.

14. PT. Kimia Farma Tbk

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 18 tanggal 16 Agustus 1971 PT. Kimia Farma didirikan. Pada awalnya Kimia Farma merupakan perusahaan yang lahir melalui kebijakan pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan asing di Indonesia dan merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Bidang usaha yang dijalankan

oleh PT. Kimia Farma Tbk meliputi pengolahan dan perdagangan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan kimia, minyak nabati, yodium, dan garam-garamnya, serta produk makanan dan minuman. PT. Kimia Farma resmi menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2001 dengan menyelenggarakan penawaran umum saham perdana di BEI dengan kode emiten KAEF.

15. PT. Kino Indonesia Tbk

Perseroan pada awalnya didirikan pada tahun 1999 dengan nama PT. Kinocare Era Kosmestindo. Bidang usaha dari PT. Kino Indonesia Tbk yaitu pengolahan, perdagangan, dan jasa untuk produk minuman ringan, kosmetik, pasta gigi, produk farmasi untuk manusia, dan produk obat tradisional. PT. Kino Indonesia Tbk resmi menjadi perusahaan terbuka tahun 2015 melalui penawaran umum perdana saham di BEI. Hingga kini saham dari PT. Kino Indonesia Tbk masih diperjualbelikan di BEI dengan kode emiten KINO.

16. PT. Kalbe Farma Tbk

Perseroan pertama kali didirikan tanggal 10 September 1966. Saat ini perseroan memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jakarta. PT. Kalbe Farma Tbk sendiri beroperasi dalam industri pengolahan dan perdagangan barang farmasi seperti obat resep, obat bebas, nutrisi, minuman berenergi, alat kesehatan dan produk kesehatan lainnya. PT. Kalbe Farma Tbk resmi menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di BEI pada tahun 1991. Saham dari PT. Kalbe Farma Tbk hingga saat ini diperjualbelikan di BEI dengan kode emiten KLBF.

17. PT. Merck Tbk

PT. Merck Tbk merupakan salah satu perusahaan dari Merck Holding GmbH asal Darmstadt, Jerman. PT. Merck Tbk di Indonesia pertama kali didirikan pada tanggal 14 Oktober 1970. Saat ini PT. Merck Tbk memiliki kantor pusat yang terletak di Jakarta. PT. Merck Tbk beroperasi dalam bidang usaha pengolahan dan perdagangan produk-produk farmasi dan obat-obatan tradisional. PT. Merck Tbk resmi menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di BEI pada tahun 1981 melalui penawaran umum saham perdana. Hingga saat ini, saham PT. Merck Tbk diperjualbelikan di BEI dengan kode emiten MERK.

18. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk

Perseroan pada awalnya berdiri di Medan pada tahun 1929 dengan nama *NV Nederlandsch-Indische Bierbrouwerijen*. Nama PT. Multi Bintang Indonesia Tbk baru digunakan pada tahun 1981 saat perseroan merelokasi domisilinya ke Jakarta, sekaligus memperdagangkan sahamnya di BEI. Perseroan sendiri bergerak dalam bidang usaha pengolahan minuman beralkohol (golongan A) dan minuman non-alkohol. Hingga saat ini, saham dari PT. Multi Bintang Indonesia masih diperjualbelikan di BEI dengan kode emiten MLBI.

19. PT. Mayora Indah Tbk

Perseroan didirikan secara perdana tahun 1977 dengan pabrik pertamanya yang terletak di Tangerang dengan target pasar wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saat ini perseroan memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jakarta. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseroan adalah usaha pengolahan dan perdagangan industri makanan meliputi produk roti dan kue, coklat dan kembang gula, makanan bayi, makanan siap saji, susu dan produk turunannya, serta minyak dan lemak nabati.

PT. Mayora Indah resmi menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1990 dengan menyelenggarakan penawaran umum saham perdana di BEI. Hingga saat ini, saham dari PT. Mayora Indah Tbk masih diperjualbelikan di BEI dengan kode emiten MYOR.

20. PT. Pyridam Farma Tbk

Perseroan perdana didirikan pada 27 November 1976 dengan nama PT. Pyridam. Saat ini PT. Pyridam Farma Tbk mempunyai kantor pusat yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan usaha dari PT. Pyridam Farma Tbk adalah industri pengolahan dan perdagangan produk-produk farmasi dan produk-produk veteriner. PT. Pyridam baru resmi menjadi perusahaan publik atau perusahaan terbuka pada tahun 2001 setelah perseroan menyelenggarakan penawaran umum saham perdana dalam rangka memperdagangkan sahamnya di BEI. Saham dari PT. Pyridam Farma Tbk hingga kini masih diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten PYFA.

21. PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk

Perseroan didirikan perdana pada tahun 1995 sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nama PT. Nippon Indosari Corporation di Cikarang, Jawa Barat. Perseroan bergerak dalam bidang usaha pabrikasi dan penjualan serta distribusi roti dan minuman ringan. Hingga saat ini saham dari PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk diperjualbelikan di BEI sejak penawaran umum saham perdananya pada tahun 2010 lalu dengan kode emiten ROTI.

22. PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Perseroan pertama kali didirikan dalam bentuk persekutuan komanditer atau CV pada tahun 1970. Seiring dengan perkembangan usaha pada tahun 1975, Sido Muncul merubah bentuk usahanya menjadi perseroan terbatas (PT). Sido Muncul sendiri bergerak dalam bidang usaha perindustrian, perdagangan serta distribusi produk-produk jamu dan farmasi. Perseroan resmi menjadi perusahaan publik setelah memperdagangkan sahamnya di BEI melalui penawaran umum saham perdana pada tahun 2013 dengan kode emiten SIDO.

23. PT. Sekar Laut Tbk

Perseroan secara perdana didirikan pada tanggal 19 Juli 1976 dengan bentuk perseroan terbatas di Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Perseroan bergerak di bidang industri pengolahan, perdagangan, dan distribusi produk-produk kerupuk, saos sambal, bumbu masak, dan roti. Produk-produk dari PT. Sekar Laut Tbk diperdagangkan dengan merek "FINNA". PT. Sekar Laut Tbk secara perdana memperdagangkan sahamnya di BEI melalui penawaran umum saham perdana pada tahun 1993. Hingga saat ini, saham dari PT. Sekar Laut Tbk masih diperjualbelikan di BEI dengan kode emiten SKLT.

24. PT. Siantar Top Tbk

Perseroan secara resmi didirikan pada tahun 1987. PT. Siantar Top Tbk bergerak pada industri usaha pengolahan, penjualan, dan distribusi produk-produk makanan ringan, biskuit, wafer dan permen. PT. Siantar Top Tbk memperdagangkan sahamnya secara perdana di BEI pada tahun 1986. Hingga saat ini, saham dari PT. Siantar Top Tbk diperjualbelikan di BEI dengan kode emiten STTP.

25. PT. Tunas Baru Lampung Tbk

Perseroan secara perdana didirikan pada tahun 1973, merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Sungai Budi Grup dan menjadi salah satu pelopor industri pertanian di Indonesia. Perseroan beroperasi dalam industri olahan kelapa sawit dan tebu serta produk-produk turunannya. PT. Tunas Baru Lampung Tbk resmi menjadi perusahaan terbuka setelah memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Februari tahun 2000. Saham dari PT. Tunas Baru Lampung Tbk sampai saat ini masih diperjualbelikan di BEI dengan kode emiten TBLA.

26. PT. Mandom Indonesia Tbk

PT. Mandom Indonesia Tbk merupakan sebuah perseroan yang resmi berdiri pada tahun 1969. PT. Mandom Indonesia beroperasi dalam industri pengolahan dan perniagaan produk-produk kosmetik, wangi-wangian, *toiletries*, bahan pembersih atau perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kemasan plastik. PT. Mandom Indonesia Tbk resmi menjadi perusahaan publik pada tanggal 30 September 1993 setelah memperdagangkan sahamnya di BEI melalui penawaran umum saham perdana. Saham dari PT. Mandom Indonesia Tbk hingga saat ini masih diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten TCID.

27. PT. Tempo Scan Pacific Tbk

Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha Grup Tempo. PT. Tempo Scan Pacific Tbk dibentuk melalui restrukturisasi perusahaan yang semula bernama PT. Scanchemie pada tahun 1990. PT. Tempo Scan Pacific Tbk sendiri beroperasi dalam industri pengolahan, perniagaan, dan distribusi barang-barang

farmasi, kosmetik, dan obat tradisional. Pada tahun 1994, PT. Tempo Scan Pacific Tbk menjadi perusahaan publik dengan memperdagangkan saham-sahamnya di BEI. Hingga kini, saham dari PT. Tempo Scan Pacific Tbk masih diperjualbelikan di BEI dengan kode emiten TSPC

28. PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk

Perseroan resmi berdiri sebagai perseroan terbatas pada 2 November 1971.

Perseroan beroperasi di bidang usaha pengolahan dan perdagangan makanan dan minuman. Produk perseroan antara lain minuman UHT (*Ultra High Temperature*)

seperti susu cair, teh, minuman kesehatan. Selain itu, PT. Ultra Jaya juga memproduksi produk makanan seperti susu bubuk dan susu kental manis.

Penawaran umum saham perdana PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk di BEI dilakukan pada 2 Juli 1990. Saham PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk diperjualbelikan di BEI dengan kode emiten ULTI.

29. PT. Unilever Indonesia Tbk

Perseroan merupakan perusahaan yang pada awalnya dibangun dari Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada tahun 1933. Perseroan

beroperasi dalam industri pengolahan dan perdagangan produk-produk barang konsumsi seperti sabun, deterjen, makanan olahan berbahan dasar susu, es krim,

produk kosmetik, minuman teh dan jus buah. PT. Unilever Indonesia resmi *listing*

di BEI sebagai perusahaan publik atau terbuka pada tahun 1982 setelah perseroan melakukan penawaran umum saham perdananya. Saham dari PT. Unilever

Indonesia Tbk diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten UNVR.

30. PT. Wismilak Inti Makmur Tbk

PT. Wismilak Inti Makmur Tbk secara perdana berdiri pada tanggal 14 Desember 1994. Perseroan beroperasi dibidang industri pengolahan dan perdagangan rokok, terutama industri bumbu rokok dan kelengkapan rokok lainnya. PT. Wismilak Inti Makmur Tbk memperdagangkan sahamnya di BEI melalui penawaran umum saham perdana sejak tanggal 18 Desember 2012.

Saham dari PT. Wismilak Inti Makmur Tbk diperjual belikan di BEI dengan kode emiten WIIM.

31. PT. Integra Indocabinet Tbk

Perseroan secara perdana berdiri pada tanggal 19 Mei 1989 sebagai perusahaan manufaktur untuk produk-produk berbahan dasar kayu. PT. Integra Indocabinet Tbk bergerak dalam bidang usaha pengolahan dan perdagangan mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya. PT. Integra Indocabinet Tbk *listing* sebagai perusahaan publik di BEI pada tanggal 21 Juni 2017. Hingga saat ini, saham PT. Integra Indocabinet Tbk diperjualbelikan di BEI dengan kode emiten WOOD.

IV.2 Analisis dan Interpretasi Data

IV.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Riset studi ini menggunakan statistik deskriptif untuk memvisualkan persebaran data sampel. Analisis statistik deskriptif menampilkan ringkasan data penelitian seperti *mean*, minimum, maksimum, standar deviasi, varian, modus, dan lain-lain (Ghodang dan Hantono, 2020:32). Analisis statistik deskriptif dalam riset studi ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan

standar deviasi. Berikut disajikan hasil analisis statistik deskriptif tiap-tiap variabel yang diteliti :

IV.2.1.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ialah klasifikasi skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diestimasi melalui jumlah aktiva perusahaan. Variabel ukuran perusahaan dalam riset studi ini diestimasi dengan memproksikan jumlah aktiva perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan kedalam logaritma natural (\ln) dalam rangka untuk meminimalisir fluktuasi data yang berlebih. Logaritma natural (\ln) dapat menyederhanakan jumlah aktiva perusahaan dengan nilai ratusan milyar bahkan triliunan rupiah tanpa mengubah proporsi jumlah aktiva yang sebenarnya (Murhadi, 2013). Berikut merupakan nilai *mean*, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi variabel ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods industry* yang terdaftar di BEI periode 2017 hingga periode 2019.

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan

Keterangan	TAHUN		
	2017	2018	2019
MINIMUM	25,796	25,955	25,974
MAKSIMUM	32,108	32,201	32,197
MEAN (RATA-RATA)	28,891	28,993	29,094
STANDAR DEVIASI	1,538	1,531	1,552
MEAN KESELURUHAN	28,993		
STANDAR DEVIASI KESELURUHAN	1,526		

Sumber : Data diolah penulis, (2021)



Gambar 4.1 Tren Rata-Rata Ukuran Perusahaan Tahun 2017-2019

Sumber : Data diolah peneliti, (2021)

Tabel dan gambar grafik 4.1 memperlihatkan nilai rata-rata ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods industry* periode 2017-2019. Umumnya ukuran perusahaan selama periode pengamatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selama periode 2017-2019 nilai rata-rata ukuran perusahaan sampel secara berturut-turut adalah sebesar 28,891; 28,993; dan 29,094. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan terbesar selama periode pengamatan ialah PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dengan nilai yang diperoleh secara berturut-turut sebesar 32,108; 32,201; dan 32,197 yang merupakan nilai maksimum variabel ukuran perusahaan selama periode tahun 2017-2019. Dilain sisi, PT. Pyridam Farma Tbk selama periode pengamatan memperoleh nilai ukuran perusahaan yang terkecil yaitu dengan nilai ukuran perusahaan secara berturut-turut sebesar 25,796; 25,955; dan 25,974 yang merupakan nilai minimum untuk variabel ukuran perusahaan pada tahun 2017-

2019. Nilai standar deviasi masing-masing periode pengamatan secara berurutan adalah sebesar 1,538; 1,531; dan 1,552. Adapun nilai rata-rata dan standar deviasi keseluruhan perusahaan sampel selama periode pengamatan tahun 2017-2019 secara berturut-turut adalah sebesar 28,993 dan 1,526.

IV.2.1.2 Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan ialah gambaran peningkatan pos penjualan suatu entitas dari tahun sebelumnya. Variabel pertumbuhan penjualan dalam penelitian ini diestimasi dengan memakai perbandingan antara penjualan suatu entitas perusahaan pada periode tertentu dengan penjualan periode sebelumnya. Apabila perbandingan tersebut menghasilkan nilai yang positif artinya perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, apabila entitas perusahaan memperoleh nilai yang negatif dari perbandingan tersebut artinya penjualan perusahaan tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut merupakan nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi pertumbuhan penjualan pada perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods industry* tahun 2017-2019.

Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penjualan

Keterangan	TAHUN		
	2017	2018	2019
MINIMUM	-0,124	-0,471	-0,140
MAKSIMUM	0,378	0,381	0,310
MEAN (RATA-RATA)	0,068	0,071	0,095
STANDAR DEVIASI	0,096	0,146	0,104
MEAN KESELURUHAN	0,078		
STANDAR DEVIASI KESELURUHAN	0,117		

Sumber : Data diolah peneliti, (2021)



Gambar 4.2 Tren Rata-Rata Pertumbuhan Penjualan Tahun 2017-2019

Sumber : Data diolah peneliti, (2021)

Tabel dan gambar grafik 4.2 memperlihatkan pertumbuhan penjualan perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods industry* periode 2017-2019.

Berdasarkan gambar grafik tersebut bisa diketahui bahwa nilai rata-rata pertumbuhan penjualan selama periode pengamatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Rata-rata nilai pertumbuhan penjualan selama tahun 2017 adalah

senilai 0,068 dengan nilai pertumbuhan penjualan terbesar diperoleh PT. Tunas Baru Lampung Tbk sebesar 0,378 yang merupakan nilai maksimum pada tahun 2017. Sedangkan, nilai pertumbuhan penjualan terkecil diperoleh PT. Wismilak

Inti Makmur Tbk dengan nilai pertumbuhan penjualan senilai -0,124 yang merupakan nilai minimum variabel pertumbuhan penjualan pada tahun 2017.

Selanjutnya, pada tahun 2018 rata-rata pertumbuhan penjualan perusahaan sampel adalah sebesar 0,071 dengan nilai pertumbuhan penjualan maksimum adalah

sebesar 0,381 pada PT. Kimia Farma Tbk dan nilai pertumbuhan penjualan minimum adalah senilai -0,471 pada PT. Merck Tbk. Terakhir, nilai pertumbuhan penjualan pada tahun 2019 memiliki rata-rata sebesar 0,095 dengan nilai maksimum senilai 0,310 pada PT. Sariguna Primatirta Tbk dan nilai minimum sebesar -0,140 pada PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Adapun secara keseluruhan nilai rata-rata dan standar deviasi variabel pertumbuhan penjualan selama periode pengamatan secara berurutan adalah sebesar 0,078 dan 0,117

IV.2.1.3 Leverage

Leverage merupakan gambaran mengenai sebanyak apa perusahaan melakukan pembiayaan dengan menggunakan utang atau aktiva perusahaan. *Debt To Equity Ratio* (DER) digunakan sebagai acuan untuk mengestimasi variabel *leverage* pada riset studi ini. DER menghitung tingkat *leverage* melalui perbandingan total liabilitas dan total ekuitas suatu perusahaan dalam periode yang sama. Total liabilitas dan total ekuitas yang digunakan dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan di BEI untuk setiap tahunnya. Tingkat *leverage* dengan hasil perhitungan yang semakin tinggi artinya semakin tinggi juga tingkat perusahaan melakukan pembiayaan menggunakan utangnya.

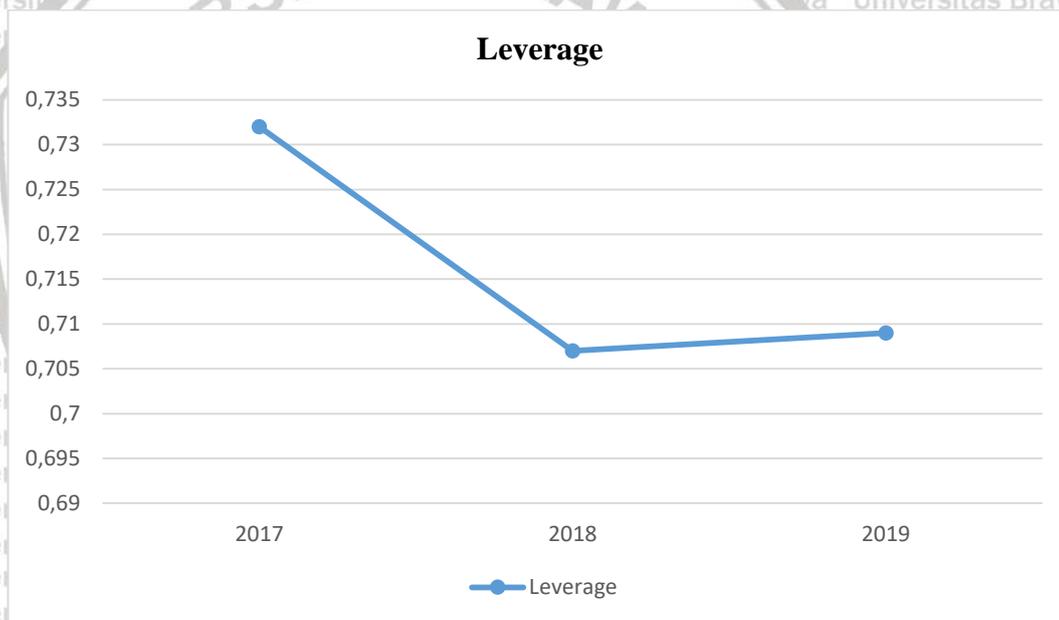
Dalam perpajakan sendiri rasio perbandingan antara utang dengan modal suatu perusahaan atau *leverage* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015 yang membatasi DER maksimal yang diperbolehkan adalah empat dibanding satu (4:1) atau 4,00. Hasil uji statistik deskriptif yang telah dilakukan menyajikan nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi variabel *leverage* pada perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods*

industry yang *listing* di BEI periode 2017-2019. Berikut merupakan hasil uji statistik deskriptif dari variabel *leverage*.

Tabel 4.3 Analisis Statistik Deskriptif *Leverage*

Keterangan	TAHUN		
	2017	2018	2019
MINIMUM	0,091	0,134	0,120
MAKSIMUM	2,655	2,416	2,909
MEAN (RATA-RATA)	0,732	0,707	0,709
STANDAR DEVIASI	0,627	0,600	0,636
<i>MEAN</i> KESELURUHAN	0,716		
STANDAR DEVIASI KESELURUHAN	0,614		

Sumber : Data diolah peneliti, (2021)



Gambar 4.3 Tren Rata-Rata *Leverage* Tahun 2017-2019

Sumber : Data diolah penulis, (2021)

Berdasarkan tabel dan gambar grafik 4.3, terlihat bahwa secara umum nilai Rasio utang terhadap ekuitas (DER) dari perusahaan sampel penelitian ini selama periode 2017-2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Nilai rata-rata DER terendah selama periode pengamatan berada pada tahun 2018 dan rata-rata DER

tertinggi berada pada tahun 2017. Rata-rata nilai DER selama tahun 2017 adalah senilai 0,732 dengan nilai maksimum sebesar 2,655 diperoleh PT. Unilever Indonesia Tbk dan nilai minimum sebesar 0,091 yang diperoleh pada PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Selanjutnya, selama tahun 2018 rata-rata nilai DER adalah senilai 0,707 dengan nilai DER maksimum adalah sebesar 2,416 yang terdapat pada PT. Tunas Baru Lampung Tbk dan nilai DER minimum senilai 0,134 yang terdapat pada PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. Terakhir, pada tahun 2019 nilai rata-rata DER sampel penelitian senilai 0,709 dengan nilai maksimum adalah sebesar 2,909 yang diperoleh PT. Unilever Indonesia Tbk dan nilai minimum sebesar 0,120 yang terdapat pada PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. Adapun nilai standar deviasi untuk DER dari perusahaan sampel selama periode pengamatan tahun 2017-2019 secara berurutan adalah sebesar 0,627; 0,600; 0,636. Nilai rata-rata dan standar deviasi dari DER perusahaan sampel selama periode pengamatan tahun 2017-2019 keseluruhan secara berturut-turut adalah sebesar 0,716 dan 0,614. Berdasarkan data tersebut nilai DER perusahaan sampel selama periode pengamatan tidak ada yang melebihi 4:1 yang merupakan batas maksimal DER yang telah ditetapkan.

IV.2.1.4 Tax Avoidance

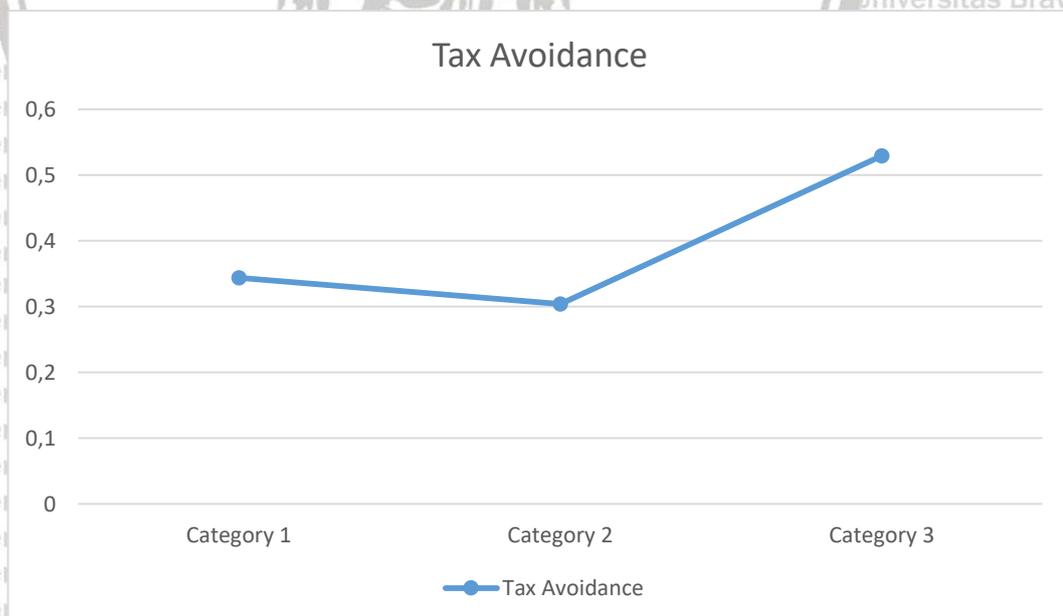
Variabel terikat yang diteliti dalam riset studi ini yaitu *tax avoidance* diestimasi mengacu pada referensi *Cash Effective Tax Ratio* (CETR). CETR dihitung menggunakan rumus besarnya pajak yang perusahaan bayarkan dibagi dengan *earning before tax*. Komponen yang digunakan dalam rumus CETR dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan setiap tahunnya. Berdasarkan ketentuan

tarif pajak penghasilan yang tercantum dalam undang-undang pajak penghasilan tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan sebagai wajib pajak badan ialah sebesar 25% dari profit netto perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan diasumsikan melakukan aktivitas *tax avoidance* apabila CETR yang dihitung bernilai dibawah 25% atau 0,25. Semakin kecil nilai CETR artinya aktivitas penghindaran pajak perusahaan semakin besar dan begitupun sebaliknya.

Tabel 4.4 Analisis Statistik Deskriptif *Tax Avoidance*

Keterangan	TAHUN		
	2017	2018	2019
MINIMUM	0,088	0,060	0,147
MAKSIMUM	1,847	1,364	5,726
MEAN (RATA-RATA)	0,344	0,304	0,529
STANDAR DEVIASI	0,303	0,232	1,083
MEAN KESELURUHAN	0,392		
STANDAR DEVIASI KESELURUHAN	0,663		

Sumber : Data diolah peneliti, (2021)



Gambar 4.4 Tren Rata-Rata *Tax Avoidance* Tahun 2017-2019

Sumber : Data diolah peneliti, (2021)

Tabel 4.4 memperlihatkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi tiap-tiap perusahaan yang dijadikan sampel dalam riset studi ini.

Pada tabel diatas tercantum bahwa selama tahun 2017 nilai rata-rata CETR adalah senilai 0,344 dengan nilai CETR tertinggi atau maksimum adalah sebesar 1,847 yang diperoleh PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. Sedangkan nilai CETR terendah atau minimum pada tahun 2017 adalah senilai 0,088 yang diperoleh PT.

Budi Starch & Sweetener Tbk. Selanjutnya sepanjang tahun 2018, nilai rata-rata CETR adalah senilai 0,304 dengan nilai CETR tertinggi atau maksimum adalah senilai 1,364 pada PT. Merck Tbk. Sedangkan nilai CETR terendah atau minimum pada tahun 2018 adalah senilai 0,060 pada PT. Hartadinata Abadi Tbk.

Terakhir, selama tahun 2019 nilai rata-rata CETR adalah senilai 0,529 dengan nilai CETR terbesar atau maksimum adalah sebesar 5,726 pada PT. Kimia Farma

Tbk. Sedangkan nilai CETR terendah atau minimum pada tahun 2019 adalah senilai 0,147 pada PT. Tunas Baru Lampung Tbk. Nilai standar deviasi masing-masing periode pengamatan secara berturut-turut adalah sebesar 0,303; 0,232; dan

1,083. Secara keseluruhan nilai rata-rata dan nilai standar deviasi perusahaan sampel selama periode pengamatan tahun 2017-2019 secara berturut-turut adalah sebesar 0,392 dan 0,663

Gambar 4.4 memperlihatkan tren nilai rata-rata CETR perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods industry* tahun 2017-2019. Nilai rata-rata CETR selama periode pengamatan berdasarkan gambar 4.1 setiap tahunnya lebih dari angka 25% atau 0,25 dengan nilai rata-rata CETR tertinggi adalah senilai 0,529 selama periode 2019. Nilai CETR selama periode pengamatan sempat mengalami

penurunan pada tahun 2018 namun penurunan tersebut masih diatas angka 25% atau 0,25 yang merupakan tarif normal pajak penghasilan wajib pajak badan berdasarkan undang-undang pajak penghasilan.

IV.2.2 Uji Asumsi Klasik

IV.2.2.1 Uji Normalitas

Normality test dilaksanakan dalam rangka menguji apakah keseluruhan populasi data pada penelitian memiliki persebaran yang normal atau tidak (Ghodang dan Hantono, 2020:32). Uji *Kolmogorov-Smirnov* digunakan pada penelitian ini sebagai metode *normality test*. Berikut disajikan secara ringkas hasil *normality test* data penelitian ini dalam bentuk tabel.

Tabel 4.5 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	93
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah penulis, (2021)

Tabel 4.5 menyajikan *normality test* menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Angka dalam tabel tersebut menampilkan nilai sig. yang dihasilkan dari *normality test* lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,200. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil uji tersebut adalah data riset studi ini telah memiliki distribusi yang normal sehingga model regresi tersebut layak dipakai sebagai prediksi.

IV.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilaksanakan dalam rangka mengetahui apakah diantara data variabel bebas terdapat korelasi satu dengan yang lain. Data yang

baik seharusnya tidak memiliki korelasi yang erat dan signifikan antar variabel bebas (Santoso, 2010:203). Riset studi ini menguji multikolinieritas dengan mempertimbangkan *Variance Inflation Factor* (VIF) serta nilai *Tolerance* dari model regresi berganda. Data riset dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas apabila hasil uji menampilkan nilai $VIF \leq 10$ dan $tolerance \geq 0,10$. Hasil uji multikolinieritas dari data penelitian ini disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Ukuran Perusahaan	,995	1,005
	Pertumbuhan Penjualan	,990	1,010
	Debt To Equity Ratio	,985	1,016

a. Dependent Variable: Cash ETR

Sumber : Data diolah peneliti, (2021)

Riset studi ini menyajikan hasil uji multikolinieritas atas data penelitian ini dalam tabel 4.6. Hasil tersebut memperlihatkan variabel ukuran perusahaan menunjukkan *tolerance* senilai 0,995 dan VIF senilai 1,005. Selanjutnya, variabel pertumbuhan penjualan memiliki *tolerance* yang bernilai 0,990 dan nilai VIF sebesar 1,010. Terakhir, variabel *leverage* menghasilkan *tolerance* dengan nilai 0,985 dan VIF senilai 1,016. Kesimpulan dari hasil tersebut adalah data penelitian yang digunakan tidak memiliki gejala multikolinieritas karena *tolerance* setiap variabel memiliki nilai yang melebihi 0,10 begitupun nilai VIF setiap variabel yang memiliki nilai kurang dari 10.

IV.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilaksanakan dalam rangka memeriksa apakah terdapat korelasi antara observasi selama periode berjalan atau periode n dengan observasi pada periode sebelumnya atau periode $n-1$ dalam model regresi linear (Ghodang dan Hantono, 2020:50). Regresi yang terbebas dari masalah autokorelasi merupakan bentuk model regresi yang layak untuk digunakan. Uji Durbin-Watson digunakan sebagai metode pengujian autokorelasi model regresi penelitian. Suatu data penelitian disimpulkan tidak memiliki gejala autokorelasi apabila hasil dari uji Durbin-Watson menunjukkan nilai $dU < d < 4-dU$. dU merupakan nilai Durbin-Watson pada tabel sedangkan d merupakan hasil uji Durbin-Watson. Hasil uji Durbin-Watson untuk uji autokorelasi atas data yang digunakan pada riset studi ini disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.7 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,824 ^a
a. Predictors: (Constant), Debt To Equity Ratio, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan	
b. Dependent Variable: Cash ETR	

Sumber : Data diolah peneliti, (2021)

Pada uji Durbin-Watson nilai dU diperoleh dengan memperhatikan jumlah variabel independen (k) dan jumlah data (n) yang digunakan suatu penelitian.

Adapun pada riset studi ini terdapat 3 variabel independen (k) yaitu ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* serta 93 data (n) dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan. Nilai dU dalam tabel Durbin-Watson

untuk $k = 3$ dan $n = 93$ adalah senilai 1,7295 dan nilai 4-dU adalah sebesar 2,2705 yang diperoleh dari hasil pengurangan $4 - 1,7295$. Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa nilai d yang diperoleh dari hasil uji Durbin-Watson adalah senilai 1,824. Oleh sebab itu, dapat dibuat kesimpulan data yang digunakan riset studi ini tidak terdapat gejala autokorelasi karena nilai d (1,824) terletak direntang nilai d_U (1,7295) dan nilai 4- d_U (2,2705).

IV.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas diselenggarakan dengan tujuan untuk menilai apakah terdapat ketidaksamaan varians atas residual suatu observasi dengan observasi yang lain (Ghozali, 2013:134). Model regresi yang baik tidak memiliki kesamaan varians untuk setiap variabel bebas atau dapat dikatakan data homoskedastisitas (Santoso, 2010:203). Uji Spearman's Rho digunakan dalam rangka mengetahui apakah terdapat gejala heteroskedastisitas atas data yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas

			Correlations			
			Ukuran Perusahaan	Pertumbuhan Penjualan	Debt To Equity Ratio	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Ukuran Perusahaan	Sig. (2-tailed)		,848	,755	,877
	Pertumbuhan Penjualan	Sig. (2-tailed)	,848		,270	,541
	Debt To Equity Ratio	Sig. (2-tailed)	,755	,270		,739
	Unstandardized Residual	Sig. (2-tailed)	,877	,541	,739	
		N	93	93	93	93

Uji Spearman's Rho mempertimbangkan signifikansi nilai masing-masing variabel independen dengan residualnya (Priyatno, 2014:108). Suatu data dikatakan tidak memiliki gejala heteroskedastisitas apabila nilai *p-value* atau signifikansi yang dihasilkan tiap-tiap variabel memiliki nilai melebihi ($>$) 0,05.

Hasil uji Spearman's Rho yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas disajikan dalam tabel 4.8. Berdasarkan tabel tersebut signifikansi nilai atau *p-value* dari X_1 (Ukuran Perusahaan), X_2 (Pertumbuhan Penjualan), dan X_3 (*Leverage*) secara berurutan senilai 0,877; 0,541; dan 0,739. Oleh karena signifikansi nilai dari data ketiga variabel yang digunakan penelitian melebihi 0,05, maka dapat dibuat kesimpulan data yang digunakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

IV.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda dianalisis untuk menentukan apakah variabel bebas memberikan pengaruh atau hubungan yang linear terhadap variabel terikat.

Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	,812	1,223
	Ukuran Perusahaan	-,015	,043
	Pertumbuhan Penjualan	-2,035	,494
	Debt To Equity Ratio	,217	,103

a. Dependent Variable: Cash ETR

Sumber : Data diolah peneliti, (2021)

Angka yang tercantum dalam tabel 4.9 diatas menyajikan hasil model regresi linear berganda. Berdasarkan tabel tersebut didapatkan nilai koefisien masing-masing variabel yang membentuk persamaan linear berganda seperti berikut :

$$Y = 0,812 - 0,015(X_1) - 2,035(X_2) + 0,217(X_3)$$

Adapun interpretasi atas bentuk persamaan diatas adalah sebagai berikut :

a. Konstanta yang bernilai 0,812 dapat diartikan bahwa apabila variabel independen yaitu ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* bernilai 0 maka variabel dependen dalam riset studi ini atau *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR akan bernilai 0,812

b. Ukuran Perusahaan (X_1) menghasilkan nilai koefisien regresi senilai -0,015. Hal tersebut dapat diartikan terdapat hubungan yang negatif atau berbanding terbalik antara variabel ukuran perusahaan dengan variabel *tax avoidance* yang diestimasi dengan CETR. Apabila jumlah aktiva perusahaan yang mencerminkan nilai ukuran perusahaan mengalami peningkatan nilai sebesar 1 satuan, maka nilai CETR akan mengalami penurunan nilai sebesar 0,015 satuan dengan asumsi variabel pertumbuhan penjualan dan variabel *leverage* bernilai tetap atau konstan. Sebaliknya, apabila variabel ukuran perusahaan mengalami penurunan nilai sebesar 1 satuan, maka CETR akan mengalami peningkatan nilai sebesar 0,015 satuan dengan asumsi variabel pertumbuhan penjualan dan *leverage* bernilai tetap atau konstan.

c. Pertumbuhan Penjualan (X_2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -2,035.

Angka tersebut mengartikan bahwa variabel pertumbuhan penjualan memiliki hubungan yang negatif atau berbanding terbalik dengan variabel *tax*

avoidance yang diproksikan dengan CETR. Apabila pertumbuhan penjualan mengalami peningkatan nilai sebesar 1 satuan, maka CETR akan mengalami penurunan senilai 2,035 satuan dengan asumsi variabel ukuran perusahaan dan variabel *leverage* memiliki nilai tetap atau tidak mengalami perubahan.

Sebaliknya, apabila variabel pertumbuhan penjualan mengalami penurunan nilai sebesar 1 satuan, maka nilai CETR akan mengalami peningkatan nilai sebesar 2,035 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap.

- d. *Leverage* (X_3) memiliki nilai koefisien regresi senilai 0,217. Hal tersebut diartikan bahwa variabel *leverage* mempunyai hubungan searah, atau berbanding lurus dengan variabel *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR. Apabila variabel *leverage* mengalami peningkatan nilai sebesar 1 satuan, maka CETR akan mengalami peningkatan senilai 0,217 satuan dengan asumsi variabel ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan memiliki nilai tetap atau konstan. Sebaliknya, apabila variabel *leverage* mengalami penurunan nilai sebesar 1 satuan maka CETR juga akan mengalami penurunan senilai 0,217 satuan dengan asumsi variabel lain memiliki nilai tetap.

IV.2.4 Uji Hipotesis

IV.2.4.1 Uji Statistik T (Parsial)

Uji parsial dilaksanakan dalam rangka memastikan apakah masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat pada suatu penelitian (Ghodang dan Hantono, 2020:77). Variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* pada riset studi ini dikatakan memiliki pengaruh

signifikan secara parsial terhadap variabel *tax avoidance* apabila hasil uji parsial menunjukkan signifikansi nilai tiap-tiap variabel kurang dari ($<$) 0,05 atau 5%.

Apabila uji parsial menampilkan signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis yang telah dirumuskan diterima, begitupun sebaliknya apabila hasil uji parsial menghasilkan signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis yang telah dirumuskan ditolak. Berikut disajikan secara ringkas dalam bentuk tabel dari hasil uji parsial atas data penelitian ini.

Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik T (Uji Parsial)

Coefficients^a

Model		T	Sig.
1	(Constant)	,664	,509
	Ukuran Perusahaan	-,347	,729
	Pertumbuhan Penjualan	-4,123	,000
	Debt To Equity Ratio	2,118	,037

Sumber : Data diolah peneliti, (2021)

Hasil uji statistik t dengan tingkat α sebesar 5% disajikan dalam tabel 4.10 diatas. Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan (X_1) memiliki signifikansi dengan nilai 0,729 pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Nilai tersebut dapat mengartikan ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap variabel dependen pada riset studi ini yaitu *tax avoidance* karena signifikansi nilai variabel ukuran perusahaan dari hasil uji parsial lebih dari ($>$) $\alpha = 0,05$. Oleh karena signifikansi nilai ukuran perusahaan melebihi nilai 0,05,

maka hipotesis 1 ditolak atau tidak terdapat pengaruh yang disebabkan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Uji parsial variabel pertumbuhan penjualan (X_2) menghasilkan signifikansi senilai 0,000 dengan signifikansi nilai $\alpha = 0,05$. Hal tersebut mengartikan pertumbuhan penjualan memberikan pengaruh kepada *tax avoidance* sebab signifikansi nilai variabel pertumbuhan penjualan pada hasil uji-t kurang dari ($<$) $\alpha = 0,05$. Oleh sebab signifikansi nilai variabel pertumbuhan penjualan kurang dari ($<$) 0,05, artinya hipotesis 2 diterima atau dapat dibuat kesimpulan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diestimasi melalui CETR.

Hasil uji parsial pada *leverage* memperlihatkan hasil signifikansi dengan nilai 0,037 pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Oleh sebab signifikansi nilai variabel *leverage* yang kurang dari ($<$) 0,05, artinya hipotesis 3 dapat diterima atau dapat dibuat kesimpulan bahwa variabel *leverage* yang terproksikan melalui DER berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang terproksikan melalui CETR.

IV.2.4.2 Uji Statistik F (Simultan)

Uji simultan diselenggarakan dalam rangka memastikan apakah variabel independen secara bersamaan atau keseluruhan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* dikatakan secara simultan memberikan pengaruh kepada variabel *tax avoidance* jika uji simultan menampilkan signifikansi nilai yang kurang dari ($<$) 0,05. Tabel berikut menyajikan data hasil uji-f yang telah dilakukan pada penelitian ini.

Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik F (Simultan)

ANOVA ^a		
Model		Sig.
1	Regression	,000 ^b
	Residual	
	Total	

Sumber : Data diolah peneliti, (2021)

Tabel 4.11 menyediakan informasi mengenai hasil uji simultan. Berdasarkan informasi tersebut bisa terlihat bahwa variabel bebas memiliki signifikansi F senilai 0,000. Oleh karena signifikansi nilai dari hasil uji simultan kurang dari ($<$) 0,05, maka model analisis regresi adalah berpengaruh. Hal tersebut menandakan bahwa hipotesis 4 diterima atau dapat diambil kesimpulan bahwa variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang terproksikan melalui CETR.

IV.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Besaran kontribusi pengaruh variabel bebas yaitu ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR dapat diketahui melalui pengujian koefisien determinasi (R^2).

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,451 ^a	,203	,176	,601610

a. Predictors: (Constant), Debt To Equity Ratio ,
Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan

Sumber : Data diolah peneliti, (2021)

Nilai koefisien determinasi (R^2) menggambarkan berapa banyak kontribusi variabel X dapat mempengaruhi variabel Y. Hasil uji koefisien determinasi atas data riset studi yang digunakan, disajikan dalam tabel 4.12 diatas. Berdasarkan tabel tersebut terlihat *Adjusted R Square* dengan nilai 0,176. Angka tersebut bisa diartikan bahwa sebanyak 17,6% *tax avoidance* terpengaruh oleh variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage*. Sisa 82,4% nya merupakan pengaruh yang diberikan oleh variabel diluar penelitian ini kepada *tax avoidance*.

IV.3 Pembahasan

V.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Secara Parsial Terhadap *Tax Avoidance*

Uji parsial dalam tabel 4.10, memperoleh hasil signifikansi dari variabel ukuran perusahaan senilai 0,729. Nilai tersebut menunjukkan ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh kepada *tax avoidance* karena signifikansi nilai variabel ukuran perusahaan melebihi tingkat $\alpha = 0,05$. Oleh sebab tersebut, maka diambil kesimpulan H_1 ditolak atau ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Brigham dan Houston (2010:4) menyebutkan ukuran perusahaan ialah skala sebuah perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil yang dapat diprosikan melalui jumlah aktiva, jumlah penjualan, jumlah profit, beban pajak, dan lain-lain.

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang berukuran besar ataupun perusahaan yang berukuran kecil menganggap bahwa pajak merupakan beban bagi perusahaan karena pajak yang seharusnya

disetorkan oleh perusahaan dapat mengurangi laba bersih yang bisa perusahaan dapatkan (Rego, 2003).

Aktivitas penghindaran pajak apabila tidak dilakukan dengan cermat maka dapat menimbulkan resiko sanksi hukum dan sanksi denda bagi wajib pajak (Zulma, 2016). Namun, manfaat penghematan pajak yang didapatkan perusahaan dari *tax avoidance* cukup menggiurkan (Zulma, 2016). Berdasarkan teori agensi, prinsipal mempekerjakan agen dalam menjalankan aktivitas usaha dengan tujuan meningkatkan nilai *shareholder* (Jensen dan Meckling, 1976). *Shareholder* (pemegang saham) sendiri merespon positif penghindaran pajak karena dapat meningkatkan laba perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan pengembalian modal lebih kepada pemegang saham (Hasan, dkk, 2013). Oleh karena hal tersebut, agen dari perusahaan kecil maupun dari perusahaan besar sebagai pihak pengelola sumber daya perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak agar tidak terlalu banyak mengurangi laba usaha yang seharusnya dapat diperoleh perusahaan (Masrullah, dkk, 2018).

Selain itu, Pohan (2013:18-19) menyebutkan, salah satu motivasi wajib pajak meminimalkan beban pajak secara legal maupun ilegal adalah karena resiko deteksi, semakin rendah resiko terdeteksi wajib pajak cenderung untuk meminimalkan beban pajaknya melalui cara ilegal maupun legal. Lemahnya aturan perpajakan di Indonesia semakin membuka peluang bagi perusahaan kecil maupun perusahaan besar untuk melakukan penghindaran pajak melalui celah aturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2003 dalam Zulma, 2016). Lemahnya aturan perpajakan yang berlaku didukung dengan sistem pemungutan *self*

assessment yang memberikan kewenangan penuh perusahaan kecil maupun perusahaan besar sebagai wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya (Resmi, 2017:10-11).

Riset studi ini memperoleh hasil yang selaras dengan hasil riset studi yang diselenggarakan oleh Dewi dan Jati (2014), yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini memperoleh hasil yang bertolak belakang dengan hasil riset studi yang diselenggarakan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) serta Puspita dan Febrianti (2017) yang menyimpulkan ukuran perusahaan memberikan pengaruh kepada aktivitas *tax avoidance*.

V.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian hipotesis untuk variabel pertumbuhan penjualan memperlihatkan pada uji parsial variabel pertumbuhan penjualan memiliki signifikansi senilai 0,000. Nilai tersebut mengartikan bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance*, karena nilai signifikansi variabel pertumbuhan penjualan kurang dari tingkat $\alpha = 0,05$. Kesimpulan yang dapat diambil atas pernyataan tersebut adalah H_2 diterima atau pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori keagenan, prinsipal memberikan tugas kepada agen untuk mengelola sumber daya yang telah diberikan oleh prinsipal dengan tujuan meningkatkan nilai *shareholder* (Jensen dan Meckling, 1976). *Shareholder* menginginkan pengembalian modal yang sesuai bahkan lebih banyak dari modal yang mereka berikan kepada perusahaan (Masrullah, dkk, 2018). Namun, agen

agen juga mempunyai kepentingannya sendiri untuk memperoleh insentif atas kinerjanya yang diukur dari laba perusahaan (Zulma, 2016). Pertumbuhan penjualan merujuk kepada pos penjualan dan jasa perusahaan yang meningkat antara penjualan periode t dengan penjualan periode $t-1$ dan dinyatakan dalam persentase (Carvalho dan Costa, 2014:91).

Pertumbuhan penjualan yang semakin besar akan menghasilkan laba yang juga semakin besar dan berakibat pembebanan pajak yang semakin besar pula (Puspita dan Febrianti, 2017). Pohan (2013:18-19) menyebutkan, motivasi wajib pajak meminimalkan beban pajak secara legal maupun ilegal salah satunya disebabkan besarnya pajak yang dibebankan, semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. Oleh karena itu, agen untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut berusaha meminimalkan beban pajak yang akan timbul dari pertumbuhan penjualan tersebut agar pajak yang timbul tidak terlalu banyak mengurangi laba yang diperoleh perusahaan dan dapat meningkatkan pengembalian modal kepada *shareholder* sekaligus meningkatkan insentif kinerja yang dapat agen peroleh dari prinsipal (Masrullah, dkk, 2018). Cara yang dapat ditempuh agen untuk manajemen beban pajak yang akan timbul secara legal dan aman adalah dengan melalui *tax avoidance* (Pohan, 2013:23).

Penelitian ini memperoleh hasil yang selaras dengan riset studi yang diselenggarakan Puspita dan Febrianti (2017), Masrullah, dkk (2018) yang memaparkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil riset studi berlawanan dengan riset studi oleh Marini, dkk (2019)

yang menyebutkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

V.3.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Uji parsial menampilkan hasil signifikansi dari variabel *leverage* senilai 0,037. Angka tersebut mengartikan bahwa terindikasi adanya pengaruh antara *leverage* yang diestimasi melalui DER terhadap *tax avoidance* disebabkan signifikansi nilai variabel *leverage* yang lebih kecil dari tingkat $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu dapat disimpulkan H_3 diterima atau *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Riset studi ini memperoleh hasil *leverage* berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*. *Leverage* sendiri ialah bentuk dari rasio keuangan yang dapat mendeskripsikan aktivitas yang telah dilakukan perusahaan dalam periode tertentu (Fitra, 2019:134). *Leverage* dalam rasio keuangan termasuk kedalam kategori rasio solvabilitas yaitu rasio yang mengukur tentang seberapa banyak aktiva atau ekuitas suatu entitas dapat menanggung utang entitas tersebut (Kasmir, 2010:110-116). Fitra (2019:134-136) menyebutkan rasio *leverage* dapat digambarkan dengan berbagai macam rasio diantaranya yaitu *Debt To Equity Ratio* (DER). Menurut (Kasmir, 2014:53), *Debt To Equity Ratio* ialah gambaran seberapa besar aktivitas perusahaan dibiayai oleh utang.

Berdasarkan teori *trade off*, perusahaan bisa mengorbankan manfaat suatu aspek untuk mendapatkan manfaat lebih pada aspek yang lain (Aisyah, 2012:6).

Teori *trade off* menjelaskan bahwa perusahaan yang membayar pajak dengan jumlah besar sebaiknya lebih banyak menggunakan utang dalam pendanaannya

dibandingkan dengan perusahaan yang membayar pajak rendah (Aisyah, 2012:18). Perusahaan dengan jumlah beban pajak yang besar dapat mengorbankan biaya kebangkrutan menjadi lebih tinggi untuk memperoleh manfaat berupa pengurangan pajak (Brigham dan Daves, 2004). Hal tersebut disebabkan aliran kas dari utang dan ekuitas dikenakan pajak yang berbeda oleh pemerintah, karena biaya bunga yang timbul dari utang dapat mengurangi pembayaran pajak sedangkan deviden tidak, bunga yang dibayarkan dapat dijadikan sebagai beban pengurang pajak (Azazi, 2008).

Menurut Fitra (2019:135) melalui rasio *leverage* dapat menggambarkan keputusan pendanaan perusahaan apakah lebih banyak menggunakan pendanaan eksternal (utang) atau pendanaan internal (ekuitas). DER menggambarkan mana yang lebih besar antara sumber pendanaan dari utang atau sumber pendanaan dari ekuitas, semakin tinggi nilai rasio DER berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari pihak eksternal (utang) yang digunakan perusahaan (Fitra, 2019:136).

Penggunaan utang yang berasal dari sumber dana eksternal berakibat munculnya biaya bunga dimana beban bunga yang muncul oleh agen digunakan sebagai insentif pajak yang akan mempengaruhi laba kena pajak, yang artinya semakin tinggi penggunaan utang dari pihak eksternal maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan sehingga ini mengindikasikan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* (Masrullah, dkk, 2018).

Riset studi ini memperoleh hasil yang selaras dengan riset studi yang diselenggarakan oleh Masrullah, dkk (2018) yang menyimpulkan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tersebut. Riset

studi ini bertolak belakang dengan riset studi yang diselenggarakan oleh Darmawan dan Sukartha (2014), Puspita dan Febrianti (2017) yang menyebutkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan.

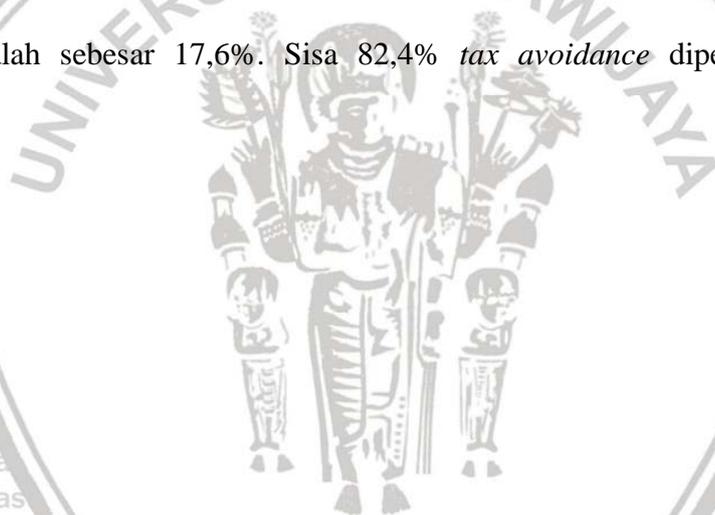
V.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Uji signifikansi simultan (uji F) menunjukkan Tabel ANOVA dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh signifikansi nilai F sebesar 0,000. Oleh karena signifikansi nilai F kurang dari ($<$) dari $\alpha = 0,05$ maka H_4 diterima. Atas hal tersebut dapat dibuat kesimpulan bahwa ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* secara simultan dapat mempengaruhi *tax avoidance* karena ketiga variabel tersebut saling berkaitan pada laporan keuangan perusahaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan besar kecilnya skala ukuran perusahaan diikuti dengan besar kecilnya penjualan tahunan yang diperoleh perusahaan, skala perusahaan yang semakin besar mencerminkan penjualan perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan juga akan mengalami peningkatan yang otomatis akan berdampak pada beban pajak yang juga akan semakin meningkat (Marini, dkk, 2019). Teori *trade off* menjelaskan bahwa perusahaan yang membayar pajak dengan jumlah besar sebaiknya lebih banyak menggunakan utang dibandingkan dengan perusahaan yang membayar pajak rendah (Aisyah, 2012:18). Hal tersebut disebabkan aliran kas dari utang dan

ekuitas dikenakan pajak yang berbeda oleh pemerintah, karena biaya bunga dapat mengurangi pembayaran pajak sedangkan deviden tidak, bunga yang dibayarkan dapat dijadikan sebagai beban pengurang pajak (Azazi, 2008). Semakin tinggi penggunaan utang dari pihak eksternal maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan sehingga ini mengindikasikan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* (Masrullah, dkk, 2018).

Persentase kontribusi pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* dari uji koefisien determinasi adalah senilai 0,176. Artinya pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* adalah sebesar 17,6%. Sisa 82,4% *tax avoidance* dipengaruhi variabel lain.



BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengolahan data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan baik perusahaan dengan skala besar maupun skala kecil memiliki motivasi dan kesempatan yang sama dalam aktivitas *tax avoidance*. Selanjutnya variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan perubahan nilai pertumbuhan penjualan akan berdampak pada tingkat aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya variabel *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan perubahan rasio utang terhadap ekuitas perusahaan berpengaruh terhadap indikasi aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Terakhir variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan apabila ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* mengalami perubahan nilai secara bersama-sama akan berpengaruh pada aktivitas *tax avoidance* perusahaan.

V.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang peneliti dapat berikan berdasarkan penelitian ini :

1. Berdasarkan hasil kesimpulan diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang meneliti variabel-variabel yang sama persis dapat menggunakan arah positif atau negatif dalam penelitian. Selain itu, bagi peneliti yang meneliti variabel-variabel yang sama persis dapat meneliti industri lain agar dapat memperoleh data yang memiliki cakupan yang berbeda.
2. Diharapkan untuk pihak perusahaan memperhatikan faktor penjualan perusahaan serta rasio *leverage* dalam mendeteksi apakah pihak manajemen perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* yang ekstrim atau tidak. Perusahaan disarankan untuk memperhatikan juga unsur-unsur perpajakan untuk menganalisis hasil kinerja manajemen perusahaan.
3. Bagi investor yang ingin menginvestasikan modalnya disarankan untuk lebih selektif dalam memilih perusahaan. Investor disarankan untuk memperhatikan juga biaya pajak perusahaan dalam menilai kinerja perusahaan melalui laporan keuangan.
4. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperjelas peraturan dan perundang-undangan perpajakan penghasilan yang sudah ada agar tidak dimanfaatkan secara ekstrim dalam aktivitas *tax avoidance*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

Aisyah, S. (2012). *Strategi Diversifikasi Korporat dan Penciptaan Nilai Perusahaan*. Malang: UB Press.

Anshori, M. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Second ed.). Surabaya: Airlangga University Press.

Astutik, R. E., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tanggungan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-16.

Ayuningtyas, N. P. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25 (3), 1884-1912.

Azazi, A. (2008). Determinan Struktur Modal Perusahaan Go Public di Bursa Efek Jakarta (BEJ) Sebelum Krisis Moneter Tahun 1993-1996. *Jurnal Penelitian Universitas Tanjungpura*, XI(2).

Baumgartner, T., Hatami, H., & Ark, J. V. (2016). *Sales Growth*. Second Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Brigham, E. F., & Daves, P. R. (2004). *Intermediete Financial Management* (8th ed.). New York: Mc Graw-Hill.Inc.

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (eleventh ed.). Jakarta: Salemba Empat.

_____. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Budiman, R. (2018). *Rahasia Analisis Fundamental Saham*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Second ed.). Jakarta:

KENCANA.

Carvalho, L., & Costa, T. (2014). Small and Medium Enterprises (SMEs) and Competitiveness: An Empirical Study. *Management Studies*, 2 (2), 88-95.

Darmawan, I. G., & Made, I. S. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9.1, 143-161.

Dewi, N. L. (2017). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21 (1), 830-859.

Dewi, N. N. (2014). PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, DAN DIMENSI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA TAX AVOIDANCE DI BURSA EFEK INDONESIA. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6 (2), 249-260.

Dewi, N. N., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax

Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6 (2), 249-260.

Dewinta, I. A., & Setiawan, P. E. (2016). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14 (3), 1584-1613.

Fahmi, I. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Purwokerto: CV IRDH.

Ghodang, H., & Hantono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif : Konsep Dasar & Aplikasi Analisis Regresi dan Jalur dengan SPSS*. Medan: PT. Penerbit Mitra Grup.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunawan, C. (2018). *Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengelola Data Dengan IBM SPSS STATISTIC 25)*. Sleman: DEEPUBLISH.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 50, 127-128.

Harahap, S. S. (2010). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Persada.

_____. (2013). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hasan, I., Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Beauty Is In The Eye of The Beholder : The Effect of Corporate Tax Avoidance On The Cost of Bank Loans. *Journal Of Financial Economics*, 109-130.

Hery. (2015). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: PT Grasindo.

Hidayat, M. (2012). *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Hidayat, W. W. (2018). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK: STUDI KASUS PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3 (1), 19-26.

_____. (2019). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK: STUDI KASUS PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3 (1), 19-26.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.

Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. (2014). *Analisis Laporan Keuangan* (Seventh ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *e-Jurnal Riset Manajemen*, 25-34.

Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (t.thn.). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

_____. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Marini, Fatahurrazak, & Ruwanti, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance Dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017.

Martono, & Harjito, A. (2010). *Manajemen Keuangan* (Third ed.). Yogyakarta: Ekonisia.

Masrullah, Mursalim, & Su'un, M. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *SiMAK*, 16, 142-165.

Messier, W., Glover, S., & Prawitt, D. (2006). *Auditing and Assurance Services*. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

- _____. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Murhadi, W. R. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Noviani, L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2018). PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF, KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN SALES GROWTH PADA TAX AVOIDANCE. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7 (1), 27-40.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15 (1), 23-40.
- Ompusunggu, P. A. (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Priyatno, D. (2014). *SPSS 22 : Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: ANDI.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 5 (3), 1625-1642.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA. *JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI*, 19 (1), 38-46.

Rahmawati, S. (2016). *Konflik Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20 (4), 805-833.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. (2005). *Corporate Finance Seventh Edition*. Singapore: McGraw Hill.

Santoso, S. (2010). *Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sari, N., Kalbuana, N., & Jumadi, A. (2016). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 431-440.

Scott, W. R. (2009). *Financial Accounting Theory*. Toronto: Pearson Practice Hall.

Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Subramanyam, K. R., & John, J. W. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA.

Supriyono, R. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suwito, E., & Herawati, A. (2005). *Analisa Laporan Keuangan* (Fourth ed.). Yogyakarta: Liberty.

Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN SALES GROWTH PADA TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10 (1), 47-62.

Syamsuddin, L. (2007). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tandelilin, E. (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Zulma, G. W. (2016). Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak dengan Moderasi Kepemilikan di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. Lampung.

PERATURAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya

Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan

Penghitungan Pajak Penghasilan

MEDIA ELEKTRONIK ATAU INTERNET

Adhitya Himawan (2017, 30 November). *Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp.110 Triliun* [on-line]. Diakses pada 19 November 2020 dari <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>

Benedicta Prima. (2019, 8 Mei). *Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 Juta* [on-line]. Diakses pada 19 November 2020 dari <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>

Budi Starch Sweetener. *Laporan Tahunan* [on-line]. Diakses pada 24 November 2020 dari <https://budistarchsweetener.com/laporan-tahunan/>

Bursa Efek Indonesia. *Laporan Keuangan dan Tahunan* [on-line]. Diakses pada 19 November 2020 dari <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>

Campina. (2020). Hubungan Investor : *Laporan Tahunan* [on-line]. Diakses pada 24 November 2020 dari <https://www.campina.co.id/id/laporan-tahunan/>

Darya Varia. (2020). *Annual Report* [on-line]. Diakses pada 24 November 2020 dari <http://www.darya-varia.com/en/investors/annual-report>

Darussalam dan Septriadi, D. (2009). *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion dan Anti Avoidance Rule*. Ortax. Diakses pada 13 April 2021 dari <https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&list=&q=&hl>
m=6

Delta Jakarta. (2020). *Annual Report* [on-line]. Diakses pada 24 November 2020 dari <https://www.deltajkt.co.id/investor/ar>

Giri Hartomo. (2020). BKPM : *Di Sektor Manufaktur, Industri Barang Konsumsi Paling Diminati* [on-line]. Diakses pada 24 November 2020 dari <https://economy.okezone.com/read/2020/05/27/320/2220565/bkpm-di-sektor-manufaktur-industri-makanan-paling-diminati?page=1>

Gudang Garam. (2020). *Investor : Annual Report* [on-line]. Diakses pada 24 November 2020 dari <https://www.gudanggaramtbk.com/en/investor/>

Kementerian Keuangan. (2020). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kita* [on-line]. Diakses pada 24 November 2020 dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>

Mandom Indonesia. (2020). *Annual Report* [on-line]. Diakses pada 24 November 2020 dari <https://www.mandom.co.id/id/annual-report>

Mayora Indah. (2020). *Mayora Annual Report* [on-line]. Diakses pada 24 November 2020 dari <https://www.mayoraindah.co.id/content/Laporan-Tahunan-Mayora-21?lang=en>

Merck. (2020). *Annual Report* [on-line]. Diakses pada 24 November 2020 dari <https://www.merckgroup.com/id-en/company/investors.html>

Indofood CBP. *Annual Report* [on-line]. Diakses pada 24 November 2020 dari <https://www.indofoodcbp.com/investor-relation/annual-report>

Indofood Sukses Makmur. *Annual Report* [on-line]. Diakses pada 24 November 2020 dari <https://www.indofood.com/investor-relation/annual-report>

Pyridam Farma. (2020). *Annual Report*. Diakses pada 24 November 2020 dari <https://www.pyfa.co.id/investor/annual-report/>

Redaksi DDTC News. (2019, 20 Agustus). *Berapa Jumlah Wajib Pajak & Tingkat Kepatuhan?* Cek Di Sini [on-line]. Diakses pada 19 November 2020 dari https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepuhannya-cek-di-sini-16815?page_y=0

Sampoerna. (2020). *Report & Filling* [on-line]. Diakses pada 24 November 2020 dari <https://www.sampoerna.com/sampoerna/en/investor-relations/reports-and-filings>

Siantar Top. (2020). *Annual Report* [on-line] Diakses pada 24 November 2020 dari <http://siantartop.co.id/en/investor-relations/annual-report/>

Unilever Indonesia. (2020). Hubungan Investor : *Laporan Keuangan* [on-line]. Diakses pada 24 November 2020 dari <https://unilever.co.id/investor-relations/publikasi-perusahaan/laporan-keuangan.html>

Wismilak. (2020). *Informasi Investor* [on-line]. Diakses pada 24 November 2020 dari <https://www.wismilak.com/id/informasi-investor>

LAMPIRAN

LAMPIRAN I Sampel Penelitian

Nomor	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk
2	CAMP	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk
3	CEKA	PT. Wilmay Cahaya Indonesia Tbk
4	CINT	PT. Chitose Internasional Tbk
5	CLEO	PT. Sariguna Primatirta Tbk
6	DLTA	PT. Delta Jakarta Tbk
7	DVLA	PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk
8	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk
9	HMSP	PT. H.M Sampoerna Tbk
10	HOKI	PT. Buyung Poetra Sembada Tbk
11	HRTA	PT. Hardinata Abadi Tbk
12	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
13	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
14	KAEF	PT. Kimia Farma Tbk
15	KINO	PT. Kino Indonesia Tbk
16	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk
17	MERK	PT. Merck Tbk
18	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
19	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk
20	PYFA	PT. Pyridam Farma Tbk
21	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
22	SIDO	PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
23	SKLT	PT. Sekar Laut Tbk
24	STTP	PT. Siantar Top Tbk
25	TBLA	PT. Tunas Baru Lampung Tbk
26	TCID	PT. Mandom Indonesia Tbk
27	TSPC	PT. Tempo Scan Pacific Tbk
28	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk
29	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk
30	WIIM	PT. Wismilak Inti Makmur Tbk
31	WOOD	PT. Integra Indocabinet Tbk

LAMPIRAN II Tabulasi Data
Tabulasi Data Tahun 2017

No	Kode Emiten	Ukuran Perusahaan	Pertumbuhan Penjualan	Leverage	Tax Avoidance
1	BUDI	28,709	0,017	1,460	0,088
2	CAMP	27,823	0,015	0,445	1,847
3	CEKA	27,962	0,035	0,542	0,340
4	CINT	26,890	0,142	0,247	0,249
5	CLEO	27,217	0,173	1,218	0,351
6	DLTA	27,924	0,003	0,171	0,259
7	DVLA	28,126	0,086	0,470	0,237
8	GGRM	31,832	0,093	0,582	0,253
9	HMSP	31,395	0,038	0,265	0,257
10	HOKI	27,081	0,054	0,212	0,340
11	HRTA	27,981	0,130	0,423	0,234
12	ICBP	31,085	0,036	0,556	0,358
13	INDF	32,108	0,053	0,881	0,447
14	KAEF	29,439	0,054	1,370	0,158
15	KINO	28,806	-0,095	0,575	0,386
16	KLBF	30,441	0,042	0,196	0,241
17	MERK	27,465	0,118	0,376	0,307
18	MLBI	28,551	0,039	1,357	0,263
19	MYOR	30,333	0,134	1,028	0,269
20	PYFA	25,796	0,028	0,466	0,218
21	ROTI	29,148	-0,012	0,617	0,264
22	SIDO	28,781	0,005	0,091	0,216
23	SKLT	27,179	0,096	1,069	0,301
24	STTP	28,482	0,075	0,692	0,210
25	TBLA	30,272	0,378	2,506	0,153
26	TCID	28,490	0,071	0,271	0,274
27	TSPC	29,637	0,047	0,463	0,724
28	ULTJ	29,277	0,041	0,232	0,338
29	UNVR	30,571	0,029	2,655	0,257
30	WIIM	27,835	-0,124	0,253	0,541
31	WOOD	28,977	0,311	1,009	0,276

Tabulasi Data Tahun 2018

No	Kode Emiten	Ukuran Perusahaan	Pertumbuhan Penjualan	Leverage	Tax Avoidance
1	BUDI	28,853	0,054	1,766	0,359
2	CAMP	27,635	0,017	0,134	0,257
3	CEKA	27,787	-0,148	0,197	0,113
4	CINT	26,920	-0,010	0,264	0,461
5	CLEO	27,449	0,352	0,312	0,112
6	DLTA	28,052	0,149	0,186	0,214
7	DVLA	28,151	0,079	0,402	0,280
8	GGRM	31,867	0,149	0,531	0,276
9	HMSP	31,473	0,077	0,318	0,246
10	HOKI	27,355	0,183	0,347	0,252
11	HRTA	28,061	0,106	0,407	0,060
12	ICBP	31,168	0,079	0,513	0,311
13	INDF	32,201	0,046	0,934	0,465
14	KAEF	29,878	0,381	1,819	0,301
15	KINO	28,910	0,143	0,643	0,172
16	KLBF	30,529	0,044	0,186	0,253
17	MERK	27,865	-0,471	1,437	1,364
18	MLBI	28,692	0,077	1,475	0,299
19	MYOR	30,498	0,156	1,059	0,304
20	PYFA	25,955	0,123	0,573	0,262
21	ROTI	29,111	0,111	0,506	0,109
22	SIDO	28,836	0,074	0,150	0,219
23	SKLT	27,340	0,143	1,203	0,170
24	STTP	28,598	0,001	0,598	0,277
25	TBLA	30,425	-0,040	2,416	0,185
26	TCID	28,525	-0,021	0,240	0,333
27	TSPC	29,694	0,055	0,449	0,723
28	ULTJ	29,346	0,122	0,164	0,308
29	UNVR	30,603	0,015	1,576	0,193
30	WIIM	27,859	-0,048	0,249	0,282
31	WOOD	29,155	0,211	0,873	0,272

Tabulasi Data Tahun 2019

No	Kode Emiten	Ukuran Perusahaan	Pertumbuhan Penjualan	Leverage	Tax Avoidance
1	BUDI	28,730	0,135	1,334	0,184
2	CAMP	27,687	0,071	0,120	0,215
3	CEKA	27,963	-0,140	0,231	0,179
4	CINT	26,980	0,112	0,338	0,418
5	CLEO	27,850	0,310	0,625	0,157
6	DLTA	27,986	-0,074	0,175	0,212
7	DVLA	28,235	0,067	0,401	0,262
8	GGRM	31,996	0,155	0,544	0,221
9	HMSP	31,561	-0,006	0,427	0,254
10	HOKI	27,467	0,155	0,323	0,356
11	HRTA	28,469	0,178	0,908	0,454
12	ICBP	31,287	0,101	0,451	0,217
13	INDF	32,197	0,044	0,775	0,270
14	KAEF	30,541	0,111	1,476	5,726
15	KINO	29,178	0,295	0,737	0,171
16	KLBF	30,640	0,074	0,213	0,247
17	MERK	27,527	0,217	0,517	2,924
18	MLBI	28,695	0,017	1,528	0,281
19	MYOR	30,577	0,040	0,923	0,202
20	PYFA	25,974	-0,013	0,530	0,251
21	ROTI	29,175	0,206	0,514	0,159
22	SIDO	28,894	0,110	0,154	0,207
23	SKLT	27,396	0,226	1,079	0,258
24	STTP	28,689	0,243	0,342	0,153
25	TBLA	30,485	-0,009	2,238	0,147
26	TCID	28,568	0,059	0,264	0,250
27	TSPC	29,756	0,090	0,446	0,764
28	ULTJ	29,519	0,140	0,169	0,203
29	UNVR	30,659	0,027	2,909	0,315
30	WIIM	27,893	-0,008	0,258	0,349
31	WOOD	29,339	0,017	1,040	0,380

LAMPIRAN III Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
X1_2017	31	25,796	32,108	28,89074	1,537986
X1_2018	31	25,955	32,201	28,99326	1,530812
X1_2019	31	25,974	32,197	29,09397	1,552116
X2_2017	31	-,124	,378	,06813	,096093
X2_2018	31	-,471	,381	,07126	,146217
X2_2019	31	-,140	,310	,09516	,103864
X3_2017	31	,091	2,655	,73219	,626709
X3_2018	31	,134	2,416	,70732	,599877
X3_2019	31	,120	2,909	,70932	,636260
Y_2017	31	,088	1,847	,34374	,302594
Y_2018	31	,060	1,364	,30426	,232237
Y_2019	31	,147	5,726	,52858	1,082780
Valid N (listwise)	31				

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan	93	25,796	32,201	28,9926 6	1,525778
Pertumbuhan Penjualan	93	-,471	,381	,07818	,116823
Leverage	93	,091	2,909	,71628	,614456
Tax Avoidance	93	,060	5,726	,39219	,662886
Valid N (listwise)	93				

LAMPIRAN IV Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,52278234
Most Extreme Differences	Absolute	,041
	Positive	,038
	Negative	-,041
Test Statistic		,041
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Ukuran Perusahaan	,995	1,005
	Pertumbuhan Penjualan	,990	1,010
	Debt To Equity Ratio	,985	1,016
	a. Dependent Variable: Cash ETR		

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,824 ^a
a. Predictors: (Constant), Debt To Equity Ratio, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan	
b. Dependent Variable: Cash ETR	

Correlations						
			Ukuran Perusahaan	Pertumbuhan Penjualan	Debt To Equity Ratio	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Ukuran Perusahaan	Correlation Coefficient	1,000	,020	-,033	,016
		Sig. (2-tailed)	.	,848	,755	,877
		N	93	93	93	93
	Pertumbuhan Penjualan	Correlation Coefficient	,020	1,000	-,115	,064
		Sig. (2-tailed)	,848	.	,270	,541
		N	93	93	93	93
	Debt To Equity Ratio	Correlation Coefficient	-,033	-,115	1,000	,035
		Sig. (2-tailed)	,755	,270	.	,739
		N	93	93	93	93
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	,016	,064	,035	1,000
		Sig. (2-tailed)	,877	,541	,739	.
		N	93	93	93	93

LAMPIRAN V Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,812	1,223		,664	,509
	Ukuran Perusahaan	-,015	,043	-,034	-,347	,729
	Pertumbuhan Penjualan	-2,035	,494	-,391	-4,123	,000
	Debt To Equity Ratio	,217	,103	,209	2,118	,037

a. Dependent Variable: Cash ETR

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,214	3	2,738	7,565	,000 ^b
	Residual	32,212	89	,362		
	Total	40,426	92			

a. Dependent Variable: Cash ETR

b. Predictors: (Constant), Debt To Equity Ratio, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,451 ^a	,203	,176	,601610

a. Predictors: (Constant), Debt To Equity Ratio, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan

LAMPIRAN VI Curriculum Vitae

BIODATA PENELITI

Nama : Faisal Rafid Akhdaniyanto
 NIM : 175030400111034
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Juni 1998
 Agama : Islam
 Email : faisalrfd@student.ub.ac.id
 No. Handphone : 0851-5638-6364
 Alamat Asal : Jl. Dana Prasetya Rt.010/Rw.08 No.44
 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo
 Jakarta Timur, DKI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

2017 – sekarang : Universitas Brawijaya
 2013-2016 : SMA Negeri 62 Jakarta
 2010-2013 : SMP Negeri 223 Jakarta
 2004-2010 : SD Negeri 01 Gedong Pagi
 2003-2004 : TK Islam Buah Hati

PENGALAMAN MAGANG

September – November 2020 : Kantor Akuntan Publik BAMS, Jakarta Selatan

PENGALAMAN ORGANISASI

2020 – 2021 : Koordinator Tim Tax Olymp
 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
 2020 – 2021 : Anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
 2018 – 2019 : Anggota Tim Tax Olymp
 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
 2017 – 2018 : Anggota Biro Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa
 HIMAPAJAK (Himpunan Mahasiswa Perpajakan)
 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

PENGALAMAN KEPANTIAAN

2020 : Relawan Pajak
 Direktorat Jenderal Pajak
 2019 : Relawan Pajak

- 2018 : Direktorat Jenderal Pajak
: Ketua Pelaksana Sosialisasi Skripsi
HIMAPAJAK (Himpunan Mahasiswa Perpajakan)
- 2018 : PIC Divisi Kestari Tax Planning Competition
HIMAPAJAK (Himpunan Mahasiswa Perpajakan)
- 2018 : PIC Divisi Transportasi dan Konsumsi Sosialisasi Magang
HIMAPAJAK (Himpunan Mahasiswa Perpajakan)

PENCAPAIAN

- Top 10 Finalis
"Tax Planning Competition 2019" Universitas Brawijaya
- Essay Terbaik
"Tax Competition 2019" Universitas Indonesia

